



BU
mn

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041

TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

KEMENTERIAN BUMN



BU
mn

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara/BUMN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 7 MEI 2024

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2024

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.718.205.623 atau mencapai 297,32% dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp1.250.565.000. Sedangkan Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp238.074.180.645 atau mencapai 98,57% dari alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp241.525.168.000.

Belanja tersebut digunakan untuk merealisasikan output strategis Kementerian BUMN Tahun 2023 secara ringkas sebagai berikut:

a. *Legal Opinion* atas Pelaksanaan Hukum Korporasi BUMN

Realisasi legal opinion diantaranya adalah Rekomendasi BUMN mengenai Permohonan Persetujuan *Debt to Equity Swap* PT Pos Logistik Indonesia dan Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait macetnya pembayaran atas Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Tujuh Ruas Tol dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

b. Laporan Keuangan Gabungan BUMN

Realisasinya berupa 4 (empat) Rekomendasi Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Roadmap BUMN;
- 2) Aspirasi Pemegang Saham untuk RKAP BUMN;
- 3) Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN;
- 4) Konsep Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan BUMN;

c. Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN

Berupa Rekomendasi Kebijakan Penyampaian Rincian Optimalisasi Target PNBPN KND TA 2024 dari Dividen BUMN di Bawah Kementerian BUMN sebagaimana Surat Asisten Deputi Bidang Keuangan Nomor: S-14/DKU.MBU/A/12/2023 tanggal 4 Desember 2023;

- d. Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan Realisasinya berupa Surat Keputusan BUMN antara lain mengenai Pemenuhan *Talent Pool*/ Bakal Calon Direksi sesuai Standar Kompetensi;
- e. Kebijakan Penguatan Daya Saing dan Penugasan BUMN
 Dalam melaksanakan pembinaan daya saing BUMN, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan pembinaan BUMN, diantaranya:
 - 1) Rekomendasi Kebijakan Dukungan Peningkatan Elektrifikasi;
 - 2) Dukungan Percepatan Proyek *Smelter Grade Alumina Refinery*;
 - 3) Pembentukan *Project Management Office* Restrukturisasi Bisnis dan Keuangan BUMN Farmasi;
 - 4) Pembentukan *Project Management Office* Restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan;
 - 5) Kebijakan Penugasan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN;
- f. Penugasan BUMN
 Dalam melaksanakan pembinaan daya saing BUMN, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan penugasan BUMN, diantaranya:
 - 1) Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - 2) Rekomendasi Kebijakan Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk;
 - 3) Evaluasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara;
 - 4) Penerbitan Medium Term Notes PT Len Industri (Persero);
 - 5) Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.002.127.509.523 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp9.956.240.656, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.962.216.033.515, Properti Investasi (neto) sebesar Rp17.882.658.285, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp24.119.544 dan Rp12.048.457.523. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.944.803.029 dan Rp1.989.182.706.494.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.609.006.353, sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp247.581.402.398 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(242.972.396.045).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp319.811.663 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(242.652.584.382).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 sebesar Rp1.940.531.687.224, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(242.652.584.382), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp4.486.123.363 dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp286.817.480.289, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.989.182.706.494.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Neraca per 31 Desember 2023. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
 (DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CATT.	2023			2022			% REAL. ANGG.
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
1	2		3	4	5	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	B.1.	1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0	0	0	0,00%
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%
A.I.2	HIBAH		0	0	0	0	0	0	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A.II)			1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	912.075.000	2.274.496.971	1.362.421.971	249,38%
B	BELANJA NEGARA								
B.I.1	Rupiah Murni	B.2.	241.525.168.000	238.074.180.645	(3.450.987.355)	198.426.521.000	196.555.127.045	(1.871.393.955)	99,06%
B.I.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	73.747.966.000	72.293.287.798	(1.454.678.202)	76.167.487.000	76.080.175.955	(87.311.045)	99,89%
B.I.1.b	Belanja Barang	B.4.	144.720.870.000	142.903.739.935	(1.817.130.065)	118.572.188.000	116.812.185.301	(1.760.002.699)	98,52%
B.I.1.c	Belanja Modal	B.5.	23.056.332.000	22.877.152.912	(179.179.088)	3.686.846.000	3.662.765.789	(24.080.211)	99,35%
JUMLAH BELANJA (B. I)			241.525.168.000	238.074.180.645	(3.450.987.355)	198.426.521.000	196.555.127.045	(1.871.393.955)	99,06%

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0	0	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	7.982.651.289	3.629.370.644	4.353.280.645	119,95
Piutang Bukan Pajak	C.3	223.609.404	178.033.935	45.575.469	25,60
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(81.498.800)	(81.270.923)	(227.877)	0,28
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		142.110.604	96.763.012	45.347.592	46,86
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.000	3.500.000	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		3.482.500	3.482.500	0	0,00
Persediaan	C.7	1.827.996.263	1.464.085.851	363.910.412	24,86
JUMLAH ASET LANCAR		9.956.240.656	5.193.702.007	4.762.538.649	91,70
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.468.058.953.000	1.468.058.953.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.9	150.009.750.037	136.884.866.357	13.124.883.680	9,59
Gedung dan Bangunan	C.10	502.779.300.372	469.161.643.003	33.617.657.369	7,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	7.706.388.680	7.706.388.680	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	1.066.410.162	1.066.410.162	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	1.040.842.000	0	1.040.842.000	100,00
Akumulasi Penyusutan	C.14	(168.445.610.736)	(143.070.024.135)	(25.375.586.601)	17,74
JUMLAH ASET TETAP		1.962.216.033.515	1.939.808.237.067	22.407.796.448	1,16
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi	C.15	21.349.361.185	0	21.349.361.185	100,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.16	(3.466.702.900)	0	(3.466.702.900)	100,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		17.882.658.285	0	15.955.710.132	100,00
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	24.240.748	28.240.748	(4.000.000)	(14,16)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.18	(121.204)	(141.204)	20.000	(14,16)
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		24.119.544	28.099.544	(3.980.000)	(14,16)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		24.119.544	28.099.544	(3.980.000)	(14,16)
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.19	16.128.603.312	16.189.997.921	(61.394.609)	(0,38)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	11.344.665.203	0	11.344.665.203	100,00
Aset Lain-lain	C.21	3.500.000	3.199.528.242	(3.196.028.242)	(99,89)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(15.428.310.992)	(18.310.510.538)	2.882.199.546	(15,74)
JUMLAH ASET LAINNYA		12.048.457.523	1.079.015.625	10.969.441.898	1016,62
JUMLAH ASET		2.002.127.509.523	1.946.109.054.243	56.018.455.280	2,88
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	9.010.472.039	378.408.493	8.632.063.546	2.281,15
Pendapatan Diterima Dimuka	C.24	3.934.330.990	5.198.958.526	(1.264.627.536)	(24,32)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12.944.803.029	5.577.367.019	7.367.436.010	132,10
JUMLAH KEWAJIBAN		12.944.803.029	5.577.367.019	7.367.436.010	132,10
EKUITAS					
Ekuitas	C.25	1.989.182.706.494	1.940.531.687.224	48.651.019.270	2,51
JUMLAH EKUITAS		1.989.182.706.494	1.940.531.687.224	48.651.019.270	2,51
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.002.127.509.523	1.946.109.054.243	56.018.455.280	2,88

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
 (DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2023	2022	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.609.006.353	4.005.137.861	603.868.492	15,08
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		4.609.006.353	4.005.137.861	603.868.492	15,08
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.609.006.353	4.005.137.861	603.868.492	15,08
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	71.964.208.043	76.356.018.861	(4.391.810.818)	(5,75)
Beban Persediaan	D.3	1.889.316.946	1.872.592.661	16.724.285	0,89
Beban Barang dan Jasa	D.4	101.579.396.242	85.668.063.712	15.911.332.530	18,57
Beban Pemeliharaan	D.5	11.349.906.656	9.746.142.434	1.603.764.222	16,46
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28.908.978.993	19.291.523.521	9.617.455.472	49,85
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	31.889.387.641	28.348.821.115	3.540.566.526	12,49
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	207.877	93.835	114.042	121,53
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		247.581.402.398	221.283.256.139	26.298.146.259	11,88
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(242.972.396.045)	(217.278.118.278)	(25.694.277.767)	11,83
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		43.500.000	1.056.000.001	(1.012.500.001)	(95,88)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		61.988.064	17.032.303	44.955.761	263,94
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(18.488.064)	1.038.967.698	(1.057.455.762)	(101,78)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		379.850.737	44.652.860	335.197.877	750,68
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		41.551.010	59.072.810	(17.521.800)	(29,66)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		338.299.727	(14.419.950)	352.719.677	(2.446,05)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	319.811.663	1.024.547.748	(704.736.085)	(68,79)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(242.652.584.382)	(216.253.570.530)	(26.399.013.852)	12,21

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA****ERICK THOHIR**

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
 (DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATT	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	1.940.531.687.224	1.961.254.155.353	(20.722.468.129)	(1,06)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(242.652.584.382)	(216.253.570.530)	(26.399.013.852)	12,21
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	4.486.123.363	(62.627.673)	4.548.751.036	(7.263,16)
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0	0	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		4.486.123.363	(62.627.673)	4.548.751.036	(7.263,16)
LAIN-LAIN		0	0	0	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	286.817.480.289	195.593.730.074	91.223.750.215	46,64
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		48.651.019.270	(20.722.468.129)	69.373.487.399	(334,77)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.989.182.706.494	1.940.531.687.224	48.651.019.270	2,51

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian BUMN bertransformasi dari unit eselon II di Kementerian Keuangan (1973-1993) menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (1993-1998) lalu menjadi Kementerian BUMN pada tahun 1998. Kementerian BUMN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sejalan dengan pembentukan kabinet pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;
- b. Sekretaris Kementerian dijabat oleh Sdr. Rabin Indrajad Hattari;
- c. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dijabat oleh Sdr. Robertus Billitea;
- d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Tedi Bharata;
- e. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Sdri. Nawal Nely;

- f. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;
- g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis oleh Sdr. Wahyu Setyawan;
- h. Staf Ahli Bidang Industri oleh Sdr. Andus Winarno.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Menteri BUMN telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 terdiri dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Menteri BUMN

melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Melalui Renstra Kementerian BUMN 2020-2024, diharapkan BUMN akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Kementerian BUMN telah mengimplementasikan keseluruhan modul dalam aplikasi tersebut yang meliputi Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Melalui SAKTI, maka proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, telah terintegrasi dalam aplikasi tersebut.

Selain mengelola DIPA BA 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Investasi Pemerintah) yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian BUMN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 50 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

d. Properti Investasi

- Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai properti investasi disajikan berdasarkan nilai tercatat dari biaya perolehan atas properti investasi yang dialihgunakan.

e. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB) dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp260.404.494.000. Sampai dengan Tahun Anggaran 2023, Kementerian BUMN telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi dari DIPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja serta optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja.

Pada tanggal 9 Desember 2022 diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, namun tidak mengubah nilai total DIPA. Selanjutnya, diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, yang pada intinya dilakukan realokasi anggaran Belanja Pegawai Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian BUMN ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dan pada 10 Oktober 2023 diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-371/MK.2/2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023 sehingga terdapat perubahan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	80.417.940.000	73.747.966.000
Belanja Barang	156.376.554.000	144.720.870.000
Belanja Modal	23.610.000.000	23.056.332.000
Total Belanja	260.404.494.000	241.525.168.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	180.666.874.000	171.308.084.000
Program Pembinaan BUMN	79.737.620.000	70.217.084.000
Total Belanja	260.404.494.000	241.525.168.000

Kementerian BUMN tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.718.205.623 atau mencapai 297,32% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.250.565.000. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.250.565.000	3.265.939.278	261,16%
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	171.661.348	100,00%
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43.500.000	100,00%
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	17.575.162	100,00%
5	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6.500.000	100,00%
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	4.000.000	100,00%
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	209.029.835	100,00%
	Total	1.250.565.000	3.718.205.623	297,32%

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 secara total mengalami kenaikan sebesar 63,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya akun yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan adanya *tenant* yang telah melakukan pembayaran secara sekaligus atas sewa ruangan jangka panjang selama 2 sampai dengan 5 tahun, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu atas pengembalian gaji/tunjangan pegawai Kementerian BUMN yang dibayarkan pada Tahun 2022, serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.265.939.278	1.193.604.057	2.072.335.221	173,62%
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	209.029.835	10.930.000	198.099.835	1.812,44%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	171.661.348	8.636.260	163.025.088	1.887,68%
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	43.500.000	1.056.000.001	(1.012.500.001)	(95,88%)
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	17.575.162	4.126.653	13.448.509	325,89%
6	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	6.500.000	0	6.500.000	100,00%
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	4.000.000	0	4.000.000	100,00%
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.200.000	(1.200.000)	(100,00%)
	Total	3.718.205.623	2.274.496.971	1.443.708.652	63,47%

Keterangan:

1. Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp3.265.939.278 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruangan, Listrik dan Air dari tenant Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Tenant	Pembayaran Ruangan	Pembayaran Listrik	Pembayaran Air	Total
PT Nitraya Bimasakti	0	40.620.329	11.061.022	51.681.351
PT BNI (Persero), Tbk	0	79.789.234	1.364.403	81.153.637
PT BRI (Persero), Tbk	0	42.566.429	1.046.974	43.613.403
PT Telekomunikasi Seluler	0	33.153.083	0	33.153.083
Koperasi Prabunara	161.412.000	19.919.513	756.159	182.087.672
Koperasi Prabunara (GS8)	2.291.377.668	17.208.252	44.508.364	2.353.094.284
PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	21.618.271	0	21.618.271
PT Bank Mandiri	0	12.177.060	0	12.177.060
PT BTN	0	6.217.017	0	6.217.017
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	326.696.500	0	0	326.696.500
PT Djakarta Llyod	154.447.000	0	0	154.447.000
Total	2.933.933.168	273.269.188	58.736.922	3.265.939.278

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp209.029.835 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp171.661.348 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
4. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp43.500.000 merupakan penyetoran atas Bea Lelang Pembeli RL 208/29/2023 Kementerian BUMN Pelelang Ilman Kumiawan Syaray terhadap Barang Milik Negara yang telah dihapuskan.
5. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp17.575.162 terdiri atas:
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat penguat sinyal HT (*repeater*) atas nama CV Dian Alpha Perkasa sebesar Rp14.850.000;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa *event organizer* kegiatan konsolidasi target kinerja Tahun 2023 Kementerian BUMN atas nama CV Yayi Mitra Talenta sebesar Rp865.702;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Lembaga Pelatihan Strategi Perusahaan/Bisnis sebesar Rp1.556.757;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Penyusunan Soal Studi Kasus Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan JF Penata Kelola Perusahaan Negara Kementerian BUMN Tahun 2023 sebesar Rp302.703.
6. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp. 6.500.000 merupakan Pendapatan hasil penjualan pemusnahan arsip Kementerian BUMN.

7. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp4.000.000 merupakan penyetoran atas pembayaran tuntutan ganti kerugian negara oleh Sdr. DNZ.

2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp238.074.180.645 atau 98,57% dari anggaran belanja sebesar Rp241.525.168.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 tersaji sebagai berikut:

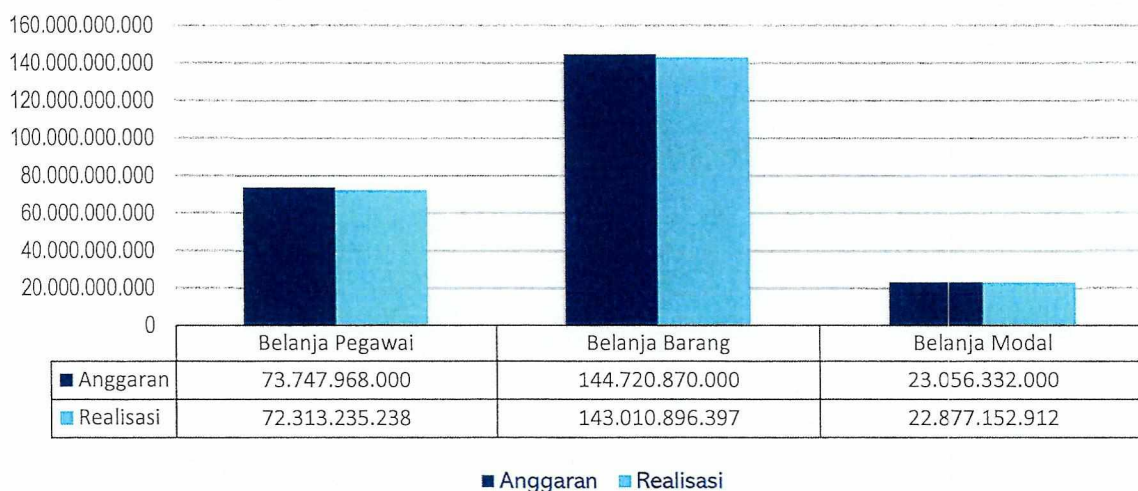
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	73.747.966.000	72.313.235.238	98,05%
2	Belanja Barang	144.720.870.000	143.010.896.397	98,82%
3	Belanja Modal	23.056.332.000	22.877.152.912	99,22%
	Total Belanja Kotor	241.525.168.000	238.201.284.547	98,62%
	Pengembalian Belanja	0	(127.103.902)	100,00%
	Total	241.525.168.000	238.074.180.645	98,57%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan Program Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian Program	31 Desember 2023		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	171.308.084.000	168.364.953.714	98,28%
Program Pembinaan BUMN	70.217.084.000	69.709.226.931	99,28%
Total Belanja	241.525.168.000	238.074.180.645	98,57%

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.293.287.798 dan Rp76.080.175.955. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 4,98% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022.

Penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara disebabkan antara lain adanya perubahan status 4 Pejabat Eselon I Non PNS menjadi PPPK per Januari 2023 yang berdampak kepada perubahan pembebanan Akun Gaji dan Tunjangan yang semula Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara menjadi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, serta adanya pengurangan pembayaran tunjangan untuk Wakil Menteri dari yang semula dibayarkan untuk 2 Wakil Menteri menjadi 1 Wakil Menteri.

Sedangkan, Penurunan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito disebabkan adanya pembayaran tunjangan kinerja Pegawai bulan Januari 2023 atas kinerja bulan Desember 2022 yang dibayarkan di Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp3.363.152.230.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	30.916.757.963	29.049.391.074	1.867.366.889	6,43%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	968.640.504	1.709.042.264	(740.401.760)	(43,32%)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	420.877.082	0	420.877.082	100,00%
4	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	40.006.959.689	45.362.767.514	(5.355.807.825)	(11,81%)
	Jumlah Belanja Kotor	72.313.235.238	76.121.200.852	(3.807.965.614)	(5,00%)
	Pengembalian Belanja Pegawai	(19.947.440)	(41.024.897)	21.077.457	(51,38%)
	Total	72.293.287.798	76.080.175.955	(3.786.888.157)	(4,98%)

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp142.903.739.935 dan Rp116.812.185.301. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,34% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2022. Kenaikan belanja barang diantaranya berasal dari:

- Peningkatan Belanja Jasa sebesar Rp9.757.623.197 atau lebih tinggi 18,14% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022, diantaranya merupakan realisasi Pengadaan Lisensi ESB Tahun 2023 sebesar Rp2.953.000.000;
- Peningkatan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp8.864.142.162 atau lebih tinggi 47,13% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022, diantaranya merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- Peningkatan Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.599.654.970 atau lebih tinggi 27,24% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022, diantaranya merupakan realisasi Belanja Operasional Lainnya berupa Perpanjangan Lisensi Anaplan sebesar Rp6.336.208.560.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Barang Operasional	21.484.913.278	16.885.258.308	4.599.654.970	27,24%
2	Belanja Barang Non Operasional	15.293.154.504	13.517.136.575	1.776.017.929	13,14%
3	Belanja Barang Persediaan	2.388.391.184	2.432.655.101	(44.263.917)	(1,82%)
4	Belanja Jasa	63.550.680.656	53.793.057.459	9.757.623.197	18,14%
5	Belanja Pemeliharaan	11.355.318.840	9.740.749.445	1.614.569.395	16,58%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.670.405.648	18.806.263.486	8.864.142.162	47,13%
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.267.552.287	502.119.949	765.432.338	152,44%
8	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	935.078.787	(935.078.787)	(100,00%)
10	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	480.000	289.075.457	(288.595.457)	(99,83%)
	Jumlah Belanja Kotor	143.010.896.397	116.901.394.567	26.109.501.830	22,33%
	Pengembalian Belanja Barang	(107.156.462)	(89.209.266)	(17.947.196)	20,12%
	Total	142.903.739.935	116.812.185.301	26.091.554.634	22,34%

Masih terdapat realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp480.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp480.000 atas transaksi kegiatan pada Semester I Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00%
2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	480.000	480.000	100,00%
	Jumlah Belanja Kotor	480.000	480.000	100,00%
	Pengembalian Belanja	0	0	0,00%
	Total	480.000	480.000	100,00%

Realisasi belanja tersebut adalah untuk biaya uji swab antigen bagi pegawai Kementerian BUMN. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus Covid-19, yang pada intinya seluruh Kementerian/Lembaga tidak lagi menggunakan akun belanja khusus Covid-19 mulai Semester II

Tahun 2023, maka Kementerian BUMN sudah tidak menggunakan akun belanja khusus Covid-19, dan telah melakukan revisi atas anggaran akun tersebut melalui Revisi DIPA ke-7 pada tanggal 13 Oktober 2023.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.877.152.912 dan Rp3.662.765.789. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 524,59% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022. Kenaikan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut sejalan dengan kebutuhan dukungan belanja modal untuk tugas dan fungsi Kementerian BUMN diantaranya:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu Pembelian Laptop bagi Pegawai Kementerian BUMN sebesar Rp5.770.520.000, Penggantian 1 Unit Genset sebesar Rp3.426.000.000, dan Pengadaan LED Videotron sebesar Rp1.150.000.000;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu Pembayaran Pekerjaan Penggantian Pipa Riser Chiller, Pipa Air Bersih Hydrant Sprinkler, dan Rooftank sebesar Rp3.555.014.820 serta Pengadaan Pekerjaan *Daycare* dan *Press Center* sebesar Rp2.419.550.000.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.387.724.246	1.860.207.169	11.527.517.077	619,69%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.489.428.666	1.802.558.620	7.686.870.046	426,44%
	Jumlah Belanja Kotor	22.877.152.912	3.662.765.789	19.214.387.123	524,59%
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0%
	Total	22.877.152.912	3.662.765.789	19.214.387.123	524,59%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri atas:

a. Uang Persediaan

(Dalam Rupiah)

No.	Bulan	Mutasi			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Januari	0	250.000.000	0	250.000.000
2	Februari	250.000.000	149.452.471	179.651.634	219.800.837
3	Maret	219.800.837	481.815.919	523.911.858	177.704.898
4	April	177.704.898	324.852.784	305.636.324	196.921.358
5	Mei	196.921.358	443.139.972	393.447.329	246.614.001
6	Juni	246.614.001	513.124.780	572.207.781	187.531.000
7	Juli	187.531.000	616.709.262	779.177.482	25.062.780
8	Agustus	25.062.780	622.817.596	591.513.754	56.366.622
9	September	56.366.622	569.732.887	471.197.631	154.901.878
10	Oktober	154.901.878	735.884.084	868.091.891	22.694.071
11	November	22.694.071	832.275.460	819.656.752	35.312.779
12	Desember	35.312.779	829.990.225	865.303.004	0

Pada bulan Januari 2023, telah dicairkan Uang Persediaan sebesar Rp250.000.000, dan sepanjang tahun 2023 telah dilakukan penggantian Uang Persediaan dengan rincian sebagaimana diatas. Selain itu, pada tanggal 15 Desember 2023 telah disetorkan Sisa Uang Persediaan ke Kas Negara sebesar Rp54.304.

b. Tambahan Uang Persediaan

Pada bulan Desember 2023, telah dicairkan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp4.867.472.028, dan sepanjang tahun 2023 telah dilakukan penggantian Tambahan Uang Persediaan sehingga pada akhir tahun 2023 sebesar Rp0. Selain itu, pada tanggal 29 Desember 2023 telah disetorkan ke Kas Negara Sisa Tambahan Uang Persediaan ke Kas Negara sebesar Rp2.380.759.567.

2. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.982.651.289 dan Rp3.629.370.644 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka			
No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pembayaran Voucher BBM	212.700.000	113.675.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i> dan <i>Antivirus</i>	4.037.920.964	2.575.788.844
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	820.930.325	403.906.800
4	Pembayaran Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN	284.500.000	536.000.000
5	Pembayaran 1 unit Genset Dimuka	2.626.600.000	0
Jumlah		7.982.651.289	3.629.370.644

3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp223.609.404 dan Rp178.033.935. Piutang bukan pajak sebesar Rp223.609.404 terdiri atas:

1. Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp83.687.249;
2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
3. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa *housekeeping*, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provices Indonesia sebesar Rp41.678.902;
4. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai a.n. M.M. dkk. sebesar Rp4.751.728;
5. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai a.n. A.K. dkk. sebesar Rp2.895.310;
6. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai a.n. S.F. dkk sebesar Rp6.629.638;
7. Kelebihan pembayaran Gaji Induk atas pengenaan hukuman disiplin untuk 1 orang pegawai a.n. A.W. sebesar Rp2.641.900;
8. Kelebihan pembayaran Gaji Induk atas pemberhentian dari jabatan struktural untuk 1 orang pegawai a.n. R.Y. sebesar Rp540.000.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp45.575.469 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022	178.033.935
Penambahan	69.330.915
- Pencatatan mutasi piutang PNPB atas sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	54.364.377
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk CPNS Mengundurkan Diri a.n. Y.I.	2.555.900
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk CPNS Mengundurkan Diri a.n. K.F.	2.599.100
- Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pengenaan Hukuman Disiplin	6.629.638
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk atas pengenaan Hukuman Disiplin a.n. A.W.	2.641.900
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk atas pemberhentian dari jabatan struktural a.n. R.Y.	540.000
Pengurangan	23.755.446
- Pelunasan kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan operasional a.n. PT Serasi Autoraya	16.044.546
- Pelunasan kelebihan pembayaran Gaji Induk CPNS Mengundurkan Diri a.n. Y.I.	5.111.800
- Pelunasan kelebihan pembayaran Gaji Induk CPNS Mengundurkan Diri a.n. K.F.	2.599.100
Jumlah Pengurangan	45.575.469
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023	45.575.469
Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023	223.609.404

Termasuk dalam nilai Piutang Bukan Pajak tersebut di atas adalah piutang atas tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN. Besaran sewa ruangan ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan. Apabila sewa terjadi sebelum adanya penetapan dari Pengelola Barang, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian BUMN dapat menetapkan nilai besaran sewa berdasarkan hasil revidi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat. Selanjutnya terhadap besaran sewa yang ditetapkan di atas melebihi dari nilai penetapan dari Pengelola Barang, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian sewa dalam hal sudah dilakukan pembayaran atau penyetoran ke kas negara. Selain pembayaran atas sewa ruangan, *tenant* juga diwajibkan membayar beban listrik dan air yang melekat pada sewa ruangan. Oleh karena itu, piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang 31 Desember 2023			
		Ruangan	Listrik	Air	Total
1	Koperasi Prabunara	16.530.074	2.380.371	2.937.071	21.847.516
2	PT BNI (Persero), Tbk	0	5.207.062	74.553	5.281.615
3	PT BRI (Persero), Tbk	0	4.782.207	74.553	4.856.760
4	PT Nitraya Bimasakti	0	3.547.341	891.674	4.439.015
5	PT Telekomunikasi Seluler	0	2.613.877	0	2.613.877
6	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	1.801.527	0	1.801.527
7	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	0	1.057.103	0	1.057.103
8	PT BTN	0	518.086	0	518.086
9	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	41.271.750	0	0	41.271.750
	Jumlah	57.801.824	21.907.574	3.977.851	83.687.249

- Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa *housekeeping* pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902 merupakan

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 Kementerian BUMN Tahun 2018. Atas temuan tersebut, telah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dan PT Provinces Indonesia, dengan melibatkan *Account Representatif* (AR) KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang pada intinya disepakati bahwa PT Provinces Indonesia akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018 sebagai syarat administrasi pengembalian kelebihan pembayaran PPN. Selanjutnya, PT Provinces Indonesia telah berupaya untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018, namun terkendala adanya perubahan NPWP Bendahara Pengeluaran Kementerian BUMN yang merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Atas hal tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, dan melalui Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-482/KPP.0601/2022 tanggal 12 Juli 2022 menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Kementerian BUMN agar mengajukan Permohonan Aktivasi NPWP Sementara, dan Bendahara Pengeluaran telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat nomor S-15/BP.MBU/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan faktur oleh PT Provinces Indonesia;
- b. PT Provinces Indonesia disarankan membuat Faktur Pajak Tahun 2021 dengan menggunakan NPWP Kementerian BUMN yang baru, namun hal ini berdampak pada dikenakannya denda keterlambatan atas kewajiban pelaporan pajak;
- c. Atas pengenaan denda tersebut PT Provinces Indonesia disarankan untuk berkonsultasi ke KPP dimana PT Provinces Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak.

Di sisi lain, PT Provinces Indonesia telah memenuhi kewajiban dengan mengembalikan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar Rp65.808.792, sedangkan unsur pengembalian kelebihan PPN sebesar Rp41.678.902 secara teknis cukup sulit untuk ditindaklanjuti oleh PT Provinces Indonesia dan menimbulkan beban denda yang menjadi tanggungan PT Provinces Indonesia dari ketentuan pelaporan pajak yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian BUMN telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-265/MBU/S/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang pada intinya agar status rekomendasi atas temuan tersebut menjadi Selesai dan Sebagian Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD). Selanjutnya apabila temuan tersebut sudah dinyatakan selesai oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran akan mengeluarkan transaksi tersebut dari saldo piutang bukan pajak.

PT Provinces Indonesia melalui surat Nomor 099.01/PVI/DIR-MA/II-2023 tanggal 1 Februari 2023 menyampaikan pula secara tertulis mengenai upaya penyelesaian yang telah dilakukan serta keberatan apabila dikenakan denda keterlambatan tersebut.

- Atas tagihan sewa ruangan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebesar Rp41.271.750, telah dilakukan setoran ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp42.097.185 (termasuk denda 2%) atas pelunasan piutang yang timbul dari selisih kekurangan sewa akibat perbedaan besaran nilai sewa yang ditetapkan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan) dengan nilai sewa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang Kementerian BUMN per 31 Desember 2023.
- Atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677, telah dilakukan pembayaran angsuran pertama ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp13.366.337. Terhadap debitur PT Artefak Arkindo, telah disampaikan surat penagihan piutang yang ketiga sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-18/S.MBU.C/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan pengalihan pengurusan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I melalui Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-93/S.MBU.C/09/2021 tanggal 2 September 2021 Hal Penyerahan Pengurusan Piutang PT Artefak Arkindo.

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(81.498.800) dan Rp(81.270.923) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

No.	Debitur	Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.057.103	0,50%	5.286	Lancar
2	PT BRI (Persero), Tbk	4.856.760	0,50%	24.284	Lancar
3	PT Telekomunikasi Seluler	2.613.877	0,50%	13.069	Lancar
4	PT BNI (Persero), Tbk	5.281.615	0,50%	26.408	Lancar
5	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	1.801.527	0,50%	9.008	Lancar
6	Koperasi Prabunara	21.847.516	0,50%	109.238	Lancar
7	PT Nitraya Bimasakti	4.439.015	0,50%	22.195	Lancar
8	PT BTN	518.086	0,50%	2.590	Lancar
9	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	41.271.750	0,50%	206.359	Lancar
10	PT Artefak Arkindo	80.784.677	100,00%	80.784.677	Macet
11	PT Provinces Indonesia	41.678.902	0,50%	208.394	Lancar
13	Pegawai Kementerian BUMN	17.458.576	0,50%	87.293	Lancar
Jumlah		223.609.404		81.498.800	

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian BUMN per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.500.000 dan Rp3.500.000. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi ke dalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian lancar tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantianannya sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(17.500) dan Rp(17.500) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.000	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/ diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.827.996.263 dan Rp1.464.085.851. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1.664.518.691	1.378.214.899
2	Bahan untuk Pemeliharaan	108.671.580	58.228.440
3	Suku Cadang	26.121.367	12.803.937
4	Persediaan Lainnya	28.684.625	14.838.575
Jumlah		1.827.996.263	1.464.085.851

Terdapat persediaan yang dicatat sebagai persediaan usang sebesar Rp80.109.070 yang masih dalam proses penjualan, terdiri atas:

- 423 buah SSP sebesar Rp6.630.525;

- b. 23 buah Pita Mesin Tik Nakajim sebesar Rp403.535;
- c. 2.400 lembar Verbal sebesar Rp1.284.000;
- d. 14 Toner Laserjet 7551 A sebesar Rp30.240.000.
- e. 1.680 Art Cartoon 260 A4 sebesar Rp2.187.360.
- f. 900 Art Cartoon 260 F4 sebesar Rp566.100
- g. 84 buah Map Kancing sebesar Rp411.180.
- h. 78 buah Bantalan Stempel sebesar Rp656.370.
- i. 16 buah Toner LaserJet sebesar Rp35.024.000.
- j. 41 buah Keyboard Classic sebesar Rp2.706.000.

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian BUMN seluruhnya seluas 17.776 M². Pada tanggal 11 Agustus 2015, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.468.058.953.000 dan Rp1.468.058.953.000. Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset Tanah sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp1.468.058.953.000 termasuk Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara (eks. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian BUMN berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penetapan status penggunaan tersebut ditindaklanjuti dengan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, nilai Tanah atas Barang Rampasan Negara tersebut sebesar Rp19.869.146.000.

Sesuai hasil klarifikasi dan verifikasi data Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian BUMN oleh Direktorat Barang Milik Negara pada tanggal 21 Oktober 2020 maka sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor BA-VER-0411X/2020 terdapat jumlah tanah sebanyak 5 (lima) bidang yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak pakai dan 4 (empat) bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan tersebut telah atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan telah berakhir hak guna bangunannya pada tanggal 2 Maret 2012. Informasi yang

diterima bahwa perpanjangan hak guna bangunan tersebut akan dilakukan oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) setelah aset tersebut ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Pada tanggal 14 Januari 2021, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) telah mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara *Non-Cash* kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: A.044/PL.303/A.I atas Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, permohonan tersebut diusulkan sebagai Penyertaan Modal Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-132/MBU/02/2021 tanggal 24 Februari 2021. Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kementerian BUMN dengan Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-158/MK.6/2022 tanggal 22 April 2022.

Menteri Keuangan telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya melalui Surat Nomor S-1114/MK.06/2022 tanggal 29 Desember 2022, namun pada akhirnya Peraturan Pemerintah atas PMPP tersebut gagal terbit pada Tahun 2023. Sejak bulan November 2022, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui mekanisme pemanfaatan sewa BMN telah menggunakan sebagian dari ruangan Gedung untuk kegiatan kantor pusat dan sebagian disewakan juga kepada tenant lain yaitu PT Djakarta Llyod.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara telah bersurat kepada Menteri Keuangan tembusan kepada Menteri BUMN Nomor: B-402/M/D-1/HK.02.02/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya, yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Alokasi dalam UU APBN hanya berlaku satu tahun namun UU APBN berlaku melebihi masa satu tahun;
2. Sumber PMN berupa Barang Milik Negara (BMN) kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) juga berupa alokasi pada UU APBN Tahun 2022 maka selaras dengan ketentuan penetapan PP PMN yang bersumber dari alokasi dana tunai (*fresh money*), penetapan PP PMN yang bersumber dari alokasi BMN pada UU APBN Tahun 2022 juga harus ditetapkan pada tahun 2022 (tidak dapat melewati batas waktu tahun anggaran berjalan) sehingga alokasi PMN dimaksud dapat dikeluarkan/dipisahkan dari APBN Tahun 2022 pada tahun 2022.

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian BUMN a.n. Menteri BUMN telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-275/MBU/S/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal Koordinasi Kelanjutan Proses Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya. Atas surat tersebut, Menteri Keuangan telah menanggapi dengan Surat Nomor: S-634/MK.6/2023 tanggal 3 September 2023 hal Koordinasi Kelanjutan Proses Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya, yang pada intinya Penyertaan Modal Negara tersebut sudah diusulkan untuk dicantumkan kembali ke dalam Pasal 35 ayat (4) huruf f RUU APBN TA 2024, dan akan diproses lebih lanjut setelah penetapan UU APBN TA 2024. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah dicantumkan bahwa Pemerintah akan melakukan penambahan PMN kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang berasal dari BMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang saat ini sudah dalam proses pembahasan antara Kementerian BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PT Perusahaan Pengelola Aset, dan PT Varuna Tirta Prakasya.

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp150.009.750.037 dan Rp136.884.866.357 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	20.185.098.171	17.840.098.171	2.345.000.000	13,14
2	Alat Angkutan	7.923.091.700	7.913.183.700	9.908.000	0,13
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.911.762.837	2.911.762.837	0	0,00
4	Alat Pengolahan	11.644.050	11.644.050	0	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.837.925.936	47.481.296.041	3.356.629.895	7,07
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.647.918.039	5.456.309.439	191.608.600	3,51
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	220.362.432	177.693.802	42.668.630	24,01
8	Alat Laboratorium	6.104.331.152	6.096.297.902	8.033.250	0,13
9	Alat Persenjataan	29.920.000	29.920.000	0	0,00
10	Komputer	55.649.392.191	48.555.401.986	7.093.990.205	14,61
11	Alat Keselamatan Kerja	199.796.453	199.796.453	0	0,00
12	Peralatan Proses/Produksi	1.332.000	0	1.332.000	100,00
13	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	75.042.000	75.042.000	0	0,00
14	Peralatan Olahraga	212.133.076	136.419.976	75.713.100	55,50
Nilai Peralatan dan Mesin		150.009.750.037	136.884.866.357	13.124.883.680	9,59
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(115.794.005.309)	(96.518.467.983)	(19.275.537.326)	19,97
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		34.215.744.728	40.366.398.374	(6.150.653.646)	(15,24)

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2022		136.884.866.357
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.387.724.246	
- Reklasifikasi dari Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.569.547.800	
- Hibah Peralatan dan Mesin	768.918.244	
- Reklasifikasi dari Hibah Gedung dan Bangunan	457.189.026	
- Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan BAST-1/PB.MBU/07/2023	1.960.319.979	
Jumlah Mutasi Tambah		19.143.699.295
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	923.071.000	
- Reklasifikasi ke Belanja Dibayar Dimuka	2.626.600.000	
- RPATA atas Genset	2.284.000.000	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Penghentian Aset Tetap berdasarkan BA-01/PHS/2023	174.726.715	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	6.093.900	
- Reklasifikasi dari Transfer Masuk Kemenpraf sebagai Aset Lain-Lain	3.500.000	
- Reklasifikasi dari Transfer Masuk Kemenpraf sebagai Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	824.000	
Jumlah Mutasi Kurang		6.018.815.615
Jumlah Mutasi		13.124.883.680
Saldo Akhir 31/12/2023		150.009.750.037
Akumulasi Penyusutan		(115.794.005.309)
Nilai Buku per 31/12/2023		34.215.744.728

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp502.779.300.372 dan Rp469.161.643.003. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan di Kementerian BUMN diakibatkan oleh adanya penambahan yang berasal dari hibah dan belanja modal gedung dan bangunan.

Adapun rincian kenaikan/penurunan tersebut disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2022		469.161.643.003
Mutasi Tambah		
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.144.057.666	
- Belanja Modal Perencanaan Pengawasan Gedung dan Bangunan	345.371.000	
- Hibah Gedung dan Bangunan	48.655.936.714	
Jumlah Mutasi Tambah		58.145.365.380
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Properti Investasi berdasarkan KET-2/KPB.MBU/12/2023	21.349.361.185	
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	2.569.547.800	
- Reklasifikasi Hibah Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	457.189.026	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	33.839.000	
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	117.771.000	
Jumlah Mutasi Kurang		24.527.708.011
Jumlah Mutasi		33.617.657.369
Saldo Akhir 31/12/2023		502.779.300.372
Akumulasi Penyusutan		(50.638.577.879)
Nilai Buku per 31/12/2023		452.140.722.493

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.706.388.680 dan Rp7.706.388.680. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.066.410.162 dan Rp1.066.410.162. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp576.910.162. Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp489.500.000.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.040.842.000 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.040.842.000 merupakan:

1. Pengadaan Pekerjaan Penggantian 1 unit Genset senilai Rp799.400.000;
2. Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Penggantian Genset Tahun 2023 Rp88.800.000;
3. Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Penggantian Genset Tahun 2024 Rp34.871.000;
4. Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Lantai 3 senilai Rp39.960.000; dan
5. Pengadaan Jasa Konsultan Renovasi Lantai 18 senilai Rp77.811.000.

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(168.445.610.736) dan Rp(143.070.024.135). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	150.009.750.037	115.794.005.309	34.215.744.728
2	Gedung dan Bangunan	502.779.300.372	50.638.577.879	452.140.722.493
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	2.013.027.548	5.693.361.132
4	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	0	1.066.410.162
	Jumlah	661.561.849.251	168.445.610.736	493.116.238.515

15. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp21.349.361.185 dan Rp0. Berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: KET-2/KPB.MBU/12/2023, terdapat pemutakhiran pencatatan dan pengakuan BMN berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

16. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(3.466.702.900) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Properti Investasi.

17. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667 per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut di atas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp24.240.748 dan Rp28.240.748. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):	
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	24.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
5‰ x 24.240.748	(121.204)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	24.119.544

18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(121.204) dan Rp(141.204) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	24.240.748	0,50%	121.204

19. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.128.603.312 dan Rp16.189.997.921. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 terdiri atas Lisensi sebesar Rp2.815.169.280 dan *Software* sebesar Rp13.313.434.032. Adapun rincian kenaikan/penurunan tersebut disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2022		16.189.997.921
Mutasi Tambah		
- N/A		0
Jumlah Mutasi Tambah		0
Mutasi Kurang		
- Penghapusan Lisensi dan <i>Software</i> berdasarkan BA-04/PHS/2023	61.394.609	
Jumlah Mutasi Kurang		61.394.609
Jumlah Mutasi		(61.394.609)
Saldo Akhir 31/12/2023		16.128.603.312
Akumulasi Amortisasi		(15.424.810.992)
Nilai Buku per 31/12/2023		703.792.320

Rincian atas Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Lisensi

Lisensi sebesar Rp2.815.169.280 terdiri atas:

Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak *virtual machine* untuk menciptakan dan menyimulasikan server secara virtual. VMware berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.

b. Software

Software sebesar Rp13.313.434.032 terdiri atas:

1. Sistem Informasi Manajemen ASN (*simanis*) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama *office automation* (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian BUMN seperti modul Pengelolaan

Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, *Monitoring* Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

2. Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (<http://pkbl.bumn.go.id>) senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan saat ini telah digunakan oleh Kementerian BUMN untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI dengan menyesuaikan data dan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp1.427.335.424, dan telah digunakan oleh Kementerian BUMN sebagai informasi masa jabatan Direksi dan Komisaris serta *talent pool* kandidat Direksi dan Komisaris BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif.
4. Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama *Executive Information System* (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal *Financial Information System* (FIS) pada tahun 2011 dan terakhir diubah menjadi SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) pada tahun 2018. Portal tersebut digunakan oleh BUMN melaporkan laporan Keuangan/manajemen secara berkala kepada Kementerian BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. SiLaba berdasarkan fungsinya sebagai media pelaporan keuangan seluruh BUMN terdiri dari Laporan *Audited*, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
5. Windows Server 2012 R2 Data Center Edition dan User Cal senilai Rp518.110.612 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
6. Exchange Server 2013 Standard dan Enterprise senilai Rp142.047.560 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
7. Exchange Standard CAL 2013 OLP NL USERCAL dan woSrvcs senilai 229.117.200 merupakan merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.

8. WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UsrCAL senilai Rp124.995.000 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
9. Software Office 2019 senilai Rp114.360.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian BUMN.
10. Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah *upgrade* sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian BUMN.
11. Microsoft SharePoint senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform* SharePoint yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari Microsoft SharePoint Server dan CAL yang merupakan *Software* untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
12. Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
13. Software Office senilai Rp744.150.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian BUMN dalam menyelesaikan tugas.
14. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
15. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
16. Navicat PostgreSQL, Nitro PDF 12, Sectigo SSL DV Certificate, Sketch senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian BUMN yang diadakan pada tahun 2019.

20. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, Menteri Keuangan membuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di

antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun Dana Di Rekening Penampungan Kementerian BUMN per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.344.665.203, yang diajukan untuk penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai RPATA
1	PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA	PERJ-01/PPK2. MBU/1/2023	Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kesehatan untuk Pengelolaan Klinik Pratama	72.434.437
2	PT CIPTA RAYA MEKAR SAHITYA	SPK-36/PPK2. MBU/2023	Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Governance Professional	91.575.000
3	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	Perj-01/PPK3.MBU/2023	Pengadaan Jasa Sewa Penyimpanan Arsip	1.100.000.000
4	PT UG MANDIRI	Perj-02/PPK3.MBU/2023	Pengadaan Jasa Pengelola Gedung	2.273.217.343
5	PT SINDO WAHANA	Perj-07/PPK3.MBU/2023	Pekerjaan Penggantian 1 Unit Lift Barang	918.000.000
6	PT PERMATA TRIKARYA UTAMA	SPK-08/PPK3.MBU/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Penggantian Genset	39.840.000
7	PT TRIMITRA MANDIRI UTAMA	SP-12/PPK3.MBU/2023	Pekerjaan Penggantian 1 Unit Genset	2.284.000.000
8	PT ALIEN DESAIN NUSANTARA	SPK-15/PPK3.MBU/2023	Jasa Perencanaan Renovasi Ruang Pers Center dan Daycare	37.740.000
9	PT DWIDA JAYA TAMA	SP-17/PPK3. MBU/2023	Pekerjaan Interior Daycare dan Press Center	1.750.000.000
10	PT HERU ADI KONSTRUKSI	SPK-23/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Pekerjaan Kanopi Outdoor Daycare	169.545.000
11	PT VIRAMA KARYA (PERSERO)	SPK-26/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Daycare dan Press Center	35.005.000
12	PT PERMATA TRIKARYA UTAMA	SPK-24/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penggantian Genset 2	34.871.000
13	PT DWI MITRA SOLUSINDO	SPK-27/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Peralatan Elektronik Daycare	99.345.000
14	PT TRUGON RUBBERNAS INDONESIA	SPK-28/PPK3. MBU/2023	Pekerjaan Teras Daycare	95.000.000
15	PT SINERGI KARYA SEJAHTERA	SPK-29/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Pekerjaan MEP Daycare	195.000.000
16	PT DWI MITRA SOLUSINDO	SPK-30/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Mainan Edukasi Anak	74.184.299
17	PT DWI MITRA SOLUSINDO	SPK-31/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Mainan Pendukung Motorik Anak	75.713.100
18	PT CASA PRIMA INDONESIA	SPK-32/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Pekerjaan MEP Press Center	175.000.000
19	YAYASAN NOERCHADIAH ALZAHIR	SPK-33/PPK3. MBU/2023	Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Personel Pengelolaan Daycare Tahun 2023	92.170.000
20	UNIVERSITAS INDONESIA	PERJ-01/PPK4. MBU/04/2023	Pengadaan Jasa Penyusunan Kajian Akademik Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan BUMN	557.640.024
21	PT FIRMUSINDO INFOTAMA	PERJ-11/PPK5. MBU/12/2022	Sewa Storage	241.536.000
22	PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK	PERJ-10/PPK5. MBU/12/2022	Langganan Naskah Dinas Elektronik	222.000.000
23	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	SP-05/PPK5. MBU/12/2022	Langganan Layanan Internet dan Colocation	402.563.000
24	PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA	PERJ-04/PPK5. MBU/03/2023	Jasa Helpdesk dan Portal HC	114.996.000
25	PT INDONESIA COMNETS PLUS	SP-11/PPK5.MBU/10/2023	Manage Service Implementasi Metode Pengembangan DevOps	193.290.000
Total				11.344.665.203

21. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.500.000 dan Rp3.199.528.242. Rincian Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset	Dasar	Nilai 31 Desember 2022	Penghentian Penggunaan	Pengusulan Penghapusan	Nilai 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Aset Tak Berwujud	SK-34/MBU/S/05/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian BUMN	3.199.528.242	0	3.199.528.242	0
2	Aset Tetap	S-54/KPB.MBU/03/2023 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan dan Mesin dan Bongkaran Bangunan pada Kementerian BUMN	0	174.726.715	174.726.715	0
3	Aset Tetap	BA/1/PL.01.08/S.1/2023 hal Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dari Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Badan Usaha Milik Negara	0	3.500.000	0	3.500.000
Total			3.199.528.242	178.226.715	3.374.254.957	3.500.000

22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(15.428.310.992) dan Rp(18.310.510.538). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Aset 31 Desember 2023	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2023	Nilai Buku 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	13.313.434.032	13.313.434.032	0
2	Lisensi	2.815.169.280	2.111.376.960	703.792.320
Jumlah		16.128.603.312	15.424.810.992	703.792.320
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.500.000	3.500.000	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0
Jumlah		3.500.000	3.500.000	0
Total		16.132.103.312	15.428.310.992	703.792.320

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2023	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	13.313.434.032	13.296.848.764	16.585.268
2	Lisensi	2.111.376.960	1.838.696.532	272.680.428
	Jumlah	15.424.810.992	15.135.545.296	289.265.696
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.500.000	0	3.500.000
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	3.174.965.242	(3.174.965.242)
	Jumlah	3.500.000	3.174.965.242	(3.171.465.242)
	Total	15.428.310.992	18.310.510.538	(2.882.199.546)

23. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.010.472.039 dan Rp378.408.493. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023, yang terdiri atas:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp37.764.690 merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Belanja Pegawai yang belum dibayarkan per 31 Desember 2023;
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp8.972.707.349 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga melalui Mekanisme RPATA yang BASTnya belum diterbitkan SPP Pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.632.063.546 dibandingkan per 31 Desember 2022 karena terdapat mutasi saldo utang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Utang Per 31 Des 2022	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Des 2023	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	Kekurangan Tunjangan Jabatan a.n. Rina Moreta	22.680.000	7.560.000	30.240.000	0	Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Tunjangan Jabatan dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301024386.
2	Kekurangan Tunjangan Jabatan a.n. Luizah dkk/2 pegawai	20.160.000	15.120.000	35.280.000	0	Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Tunjangan Jabatan dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301024903.
3	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk 4 pegawai a.n. Syahrudin dkk	13.232.171	0	0	13.232.171	
4	Kekurangan Gaji atas Pengangkatan Jabatan Struktural a.n. Mukhammad Syaiful Anam	1.260.050	0	1.260.050	0	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301005439.
5	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Gaji Berkala bulan April tahun 2022 a.n. Nurul Fadillah dkk/11 pegawai	9.378.188	8.638	9.386.826	0	Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301019362.
6	Kekurangan Tunjangan Jabatan Fungsional a.n. Anna Muslikhah Jamil dkk/11 pegawai	258.730.410	2.291.100	261.021.510	0	Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Tunjangan Jabatan dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301005438.
7	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Gaji Berkala tahun 2022 a.n. Sugianto dkk/11 pegawai	18.111.264	227.850	18.339.114	0	Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301005440.
8	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2022 a.n. Royza Fauzy/17 pegawai	8.412.051	26.302	8.438.353		Terdapat perubahan kekurangan pembayaran Kenaikan Gaji dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301019363.
9	Kekurangan Tunjangan Fungsional a.n. Agus Waluyo dkk/2 pegawai	1.300.000	-	1.300.000	-	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191301006739.
10	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2020	21.375.586	-	21.375.586	-	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191302018742 dan SP2D 230191302018743

No	Uraian	Nilai Utang Per 31 Des 2022	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Des 2023	Keterangan
			Tambah	Kurang		
11	Kekurangan Tunjangan Kinerja November 2022 a.n. Atika Desy Aryani	3.768.773	0	3.768.773	0	Telah dilakukan pembayaran melalui SP2D 230191302000063.
12	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat bulan April tahun 2023 a.n. Afief Akmal dkk/94 pegawai	0	12.051.329	8.174.270	3.877.059	Terdapat kekurangan pembayaran Gaji dan telah dibayarkan melalui SP2D 230191301066893.
13	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat Pengabdian bulan September tahun 2023 a.n. Darajat/1 pegawai	0	167.900	0	167.900	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian periode bulan September 2023
14	Kekurangan Tunjangan Kinerja atas Pengangkatan Jabatan Fungsional bulan Januari tahun 2023 s.d. bulan Oktober tahun 2023 a.n. Sarpi dkk./2 pegawai	0	20.487.560	0	20.487.560	
15	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dari Transaksi RPATA	0	8.972.707.349	0	8.972.707.349	Akan dihapuskan pada saat terdapat SPP Pembayaran di tahun selanjutnya
		378.408.493	9.030.648.028	398.584.482	9.010.472.039	

24. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian BUMN yang telah dibayarkan oleh *tenant* untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.934.330.990 dan Rp5.198.958.526. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.934.330.990 terdiri atas:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Pembayaran Yang Dilakukan	Pendapatan Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	398.541.000	377.414.100	21.126.900
2	PT BRI (Persero), Tbk	5.794.926.000	4.901.786.700	893.139.300
3	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	226.185.000	39.915.000
4	PT BNI (Persero), Tbk	5.212.958.000	4.974.953.556	238.004.444
5	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	268.045.000	214.436.000	53.609.000
6	PT Danareksa	156.855.000	130.712.500	26.142.500
7	Koperasi Prabunara	6.075.332.669	3.830.607.490	2.244.725.179
8	PT Nitraya Bimasakti	1.049.739.000	697.041.000	352.698.000
9	PT BTN	122.543.000	103.871.333	18.671.667
10	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	373.555.500	344.534.500	29.021.000
11	PT Djakarta Lloyd	154.447.000	137.169.000	17.278.000
Jumlah		19.873.042.169	15.938.711.179	3.934.330.990

25. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.989.182.706.494 dan Rp1.940.531.687.224. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.609.006.353 dan Rp4.005.137.861. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian BUMN oleh para *tenant*, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	% Naik/(Turun)
	31 Desember 2023	31 Desember 2022		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.584.931.191	3.999.811.208	585.119.983	14,63
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	17.575.162	4.126.653	13.448.509	325,89
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	6.500.000	0	6.500.000	100,00
Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji	0	1.200.000	(1.200.000)	(100,00)
Total	4.609.006.353	4.005.137.861	603.868.492	15,08

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.584.931.191 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh <i>Tenant</i>	3.265.939.278
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	5.198.958.526
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(3.934.330.990)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	54.364.377
	<u>4.584.931.191</u>

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp17.575.162 terdiri atas:

- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat penguat sinyal HT (repeater) atas nama CV Dian Alpha Perkasa sebesar Rp14.850.000;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa *event organizer* konsolidasi target kinerja Tahun 2023 Kementerian BUMN atas nama CV Yayi Mitra Talenta sebesar Rp865.702;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Lembaga Pelatihan Strategi Perusahaan/Bisnis sebesar Rp1.556.757;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Penyusunan Soal Studi Kasus Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan JF Penata Kelola Perusahaan Negara Kementerian BUMN Tahun 2023 sebesar Rp302.703.

3. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp. 6.500.000 merupakan Pendapatan hasil penjualan pemusnahan arsip Kementerian BUMN.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp71.964.208.043 dan Rp76.356.018.861. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun) Antar Tahun
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	30.916.757.963	29.049.391.074	1.867.366.889	6,43
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	968.640.504	1.709.042.264	(740.401.760)	(43,32)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	420.877.082	0	420.877.082	100,00
4	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	40.006.959.689	45.362.767.514	(5.355.807.825)	(11,81)
	Jumlah Belanja Kotor	72.313.235.238	76.121.200.852	(3.807.965.614)	(5,00)
	Pengembalian Belanja Pegawai	(19.947.440)	(41.024.897)	21.077.457	(51,38)
	Jumlah	72.293.287.798	76.080.175.955	(3.786.888.157)	(4,98)
1	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	0	(68.178.791)	68.178.791	(100,00)
2	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	(7.560.000)	(5.451.210)	(2.108.790)	38,68
3	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2022	0	345.704.134	(345.704.134)	(100,00)
4	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2022	(336.240.736)	0	(336.240.736)	100,00
5	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2023	24.532.519	0	24.532.519	100,00
6	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2023	(9.811.538)	0	(9.811.538)	100,00
7	Koreksi Audited BPK Koreksi Pembayaran Tunjangan Kinerja 2022 di Tahun 2023	0	3.768.773	(3.768.773)	(100,00)
	Total	71.964.208.043	76.356.018.861	(4.391.810.818)	(5,75)

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.889.316.946 dan Rp1.872.592.661. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.819.118.257	1.784.611.108	34.507.149	1,93
2	Beban Persediaan Lainnya	70.198.689	87.981.553	(17.782.864)	(20,21)
	Total	1.889.316.946	1.872.592.661	16.724.285	0,89

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp101.579.396.242 dan Rp85.668.063.712. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Beban Barang Operasional	19.597.379.240	17.710.084.668	1.887.294.572	10,66
2	Beban Barang Non Operasional	15.542.762.685	13.932.094.908	1.610.667.777	11,56
3	Beban Jasa	66.373.694.908	54.025.884.136	12.347.810.772	22,86
4	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	65.559.409	0	65.559.409	100,00
	Beban Jasa	101.579.396.242	85.668.063.712	15.911.332.530	18,57

1) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.597.379.240 dan Rp17.710.084.668. Rincian Beban Barang Operasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Barang Operasional	21.484.913.278	17.809.567.563	3.675.345.715	20,64
	Jumlah Belanja Kotor	21.484.913.278	17.809.567.563	3.675.345.715	20,64
	Pengembalian Belanja Barang Operasional	(8.378.393)	0	(8.378.393)	100,00
	Jumlah	21.476.534.885	17.809.567.563	3.666.967.322	20,59
1	Penyesuaian atas Biaya License, Antivirus, Warranty	(1.879.155.645)	756.471.105	(2.635.626.750)	(348,41)
2	Penyesuaian atas transaksi gantung berupa aset tetap ekstrakomtabel	0	11.655.000	(11.655.000)	(100,00)
3	Koreksi Audited BPK Koreksi Pencatatan Lisensi Tahun 2023	0	(855.954.000)	855.954.000	(100,00)
4	Koreksi Audited BPK Koreksi Transaksi Gantung	0	(11.655.000)	11.655.000	(100,00)
	Total	19.597.379.240	17.710.084.668	1.887.294.572	10,66

2) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.542.762.685 dan Rp13.932.094.908. Rincian Beban Barang Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Barang Non Operasional	15.293.154.504	13.517.136.575	1.776.017.929	13,14
	Jumlah Belanja Kotor	15.293.154.504	13.517.136.575	1.776.017.929	13,14
	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	(1.891.819)	0	(1.891.819)	100,00
	Jumlah	15.291.262.685	13.517.136.575	1.774.126.110	13,13
1	Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka Biaya Pendidikan S1 dan S2 pegawai Kementerian BUMN	251.500.000	414.958.333	(163.458.333)	100,00
	Jumlah	15.542.762.685	13.932.094.908	1.610.667.777	11,56

3) Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.373.694.908 dan Rp54.025.884.136. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Jasa	63.551.160.656	54.020.553.096	9.530.607.560	17,64
	Jumlah Belanja Kotor	63.551.160.656	54.020.553.096	9.530.607.560	17,64
	Pengembalian Belanja Jasa	(67.907.308)	0	(67.907.308)	100,00
	Jumlah	63.483.253.348	54.020.553.096	9.462.700.252	17,52
1	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	(20.718.975)	0	(20.718.975)	100,00
2	Pelunasan Tunggakan Beban Air Listrik Tahun 2020	(656.611)	0	(656.611)	100,00
3	Penihilan Transaksi RPATA 2024	(87.957.854)	0	(87.957.854)	100,00
4	Hibah Jasa Lainnya	2.999.775.000	0	2.999.775.000	100,00
5	Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	0	20.718.975	(20.718.975)	(100,00)
6	Tunggakan Beban Langganan Air Tahun 2020	0	656.611	(656.611)	(100,00)
7	Pengembalian atas sewa Mobil Voxy	0	(16.044.546)	16.044.546	(100,00)
	Jumlah	66.373.694.908	54.025.884.136	12.347.810.772	22,86

4) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp65.559.409 dan Rp0. Rincian Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Des 2023	31 Des 2022		
1	Penyesuaian Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	65.559.409	0	65.559.409	100,00
	Jumlah	65.559.409	0	65.559.409	100,00

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.349.906.656 dan Rp9.746.142.434. Beban pemeliharaan merupakan beban

yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/(turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Pemeliharaan	11.355.318.840	9.740.749.445	1.614.569.395	16,58
1	Koreksi Pencatatan Voucher BBM	(99.025.000)	(108.425.000)	9.400.000	(8,67)
2	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	60.490.260	59.033.160	1.457.100	2,47
3	Beban Persediaan Suku Cadang	33.122.556	66.912.329	(33.789.773)	(50,50)
4	Koreksi Audited BPK Koreksi Pencatatan Lisensi	0	(12.127.500)	12.127.500	(100,00)
	Jumlah	11.349.906.656	9.746.142.434	1.603.764.222	16,46

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.908.978.993 dan Rp19.291.523.521. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.670.405.648	18.789.403.572	8.881.002.076	47,27
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.267.552.287	502.119.949	765.432.338	152,44
	Jumlah Belanja Kotor	28.937.957.935	19.291.523.521	9.646.434.414	50,00
	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(28.978.942)	0	(28.978.942)	(100,00)
	Jumlah	28.908.978.993	19.291.523.521	9.617.455.472	49,85

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.889.387.641 dan Rp28.348.821.115. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2023	31 Desember 2022		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.491.066.696	16.969.180.399	521.886.297	3,08
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.815.554.754	8.850.027.102	4.965.527.652	56,11
Beban Penyusutan Jaringan	255.080.784	255.080.784	0	0,00
Jumlah	31.561.702.234	26.074.288.285	5.487.413.949	21,05
Beban Amortisasi Software	42.633.879	178.286.518	(135.652.639)	(76,09)
Beban Amortisasi Lisensi	283.284.228	2.092.737.312	(1.809.453.084)	(86,46)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	1.767.300	3.509.000	(1.741.700)	(49,64)
Jumlah	327.685.407	2.274.532.830	(1.946.847.423)	(85,59)
Total	31.889.387.641	28.348.821.115	3.540.566.526	12,49

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp207.877 dan Rp93.835. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 sebesar Rp207.877 merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Piutang Macet dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2023	31 Desember 2022		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43.500.000	1.056.000.001	(1.012.500.001)	(95,88)
2 Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	(61.988.064)	(17.032.303)	(44.955.761)	263,94
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(18.488.064)	1.038.967.698	(1.057.455.762)	(101,78)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
1 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	169.105.448	0	169.105.448	100,00
2 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	192.985.289	10.930.000	182.055.289	1.665,65
3 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	33.722.860	(33.722.860)	(100,00)
4 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(20.514.750)	20.514.750	(100,00)
5 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	17.760.000	0	17.760.000	100,00
6 Beban Persediaan Usang	(41.551.010)	0	(41.551.010)	100,00
7 Koreksi Audited BPK Koreksi Persediaan Usang Belum Dicatat	0	(38.558.060)	38.558.060	(100,00)
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	338.299.727	(14.419.950)	352.719.677	(2.446,05)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	319.811.663	1.024.547.748	(704.736.085)	(68,79)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.940.531.687.224 dan Rp1.961.254.155.353.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(242.652.584.382) dan Rp(216.253.570.530). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(4.486.123.363) dan Rp(62.627.673). Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp(4.486.123.363) adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang merupakan dampak dari transaksi hibah Gedung dan Bangunan.

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp286.817.480.289 dan Rp195.593.730.074. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	238.074.180.645
Diterima dari Entitas Lain	(3.718.205.623)
Transfer Masuk	11.248.800
Pengesahan Hibah Langsung	52.450.256.467
Jumlah	286.817.480.289

Transfer Masuk sebesar Rp11.248.800 merupakan nilai buku dari serah terima BMN berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-Lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mekanisme Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) berdasarkan BAST-1/PB.MBU/07/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp52.450.256.467 merupakan hibah dalam bentuk barang berupa:

1. Renovasi Masjid dan Jembatan Penghubung sejumlah Rp17.700.930.671 yang berasal dari Majelis Kerohanian Islam Kementerian BUMN; dan
2. Renovasi *Landscape* dan Ruang Publik sejumlah Rp34.749.325.796 yang berasal dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Koordinator Kegiatan Renovasi *Landscape* dan Ruang Publik.

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.989.182.706.494 dan Rp1.940.531.687.224.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Pekerjaan Yang Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran Berikutnya

Terdapat pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya yaitu Penggantian 1 (satu) Unit Genset pada Kementerian BUMN Tahun 2023 dengan Nomor Kontrak SP-12/PPK3.MBU/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Sesuai dengan kontrak tersebut di atas, Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2023, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan pertama diakibatkan perlunya tambahan waktu untuk fabrikasi remote radiator yang menggunakan teknologi khusus. Atas keterlambatan ini, telah dibuat addendum kontrak Nomor: ADD-01/12/PPK3.MBU/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang mengatur perpanjangan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
- b. Keterlambatan kedua diakibatkan perlunya tambahan waktu untuk pengiriman dari negara produsen (Cina) dan proses pengeluaran barang di Bea Cukai. Atas keterlambatan tersebut, telah dibuat addendum kontrak Nomor: ADD-02/12/PPK3.MBU/2023 tanggal 31 Desember 2023 untuk perpanjangan selama 31 (tiga puluh satu) hari atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- c. Keterlambatan ketiga diakibatkan masih adanya pekerjaan yang belum selesai yaitu instalasi, *testing*, *commissioning*, dan *transfer knowledge* yang membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari kalender untuk penyelesaiannya, maka dilakukan addendum kontrak dengan Nomor: ADD-03/12/PPK3.MBU/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada intinya menyatakan memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lambat 13 (tiga belas) hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Pemberian kesempatan tersebut didasari Surat Pernyataan kesanggupan dari Penyedia yaitu PT Trimitra Mandiri Utama dengan Nomor: 001/S.PNY/TMU.BUMN/GEN/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

2. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian BUMN yang terdiri dari 2 (dua) Wakil Menteri, 1 (satu) Sekretaris Kementerian, 3 (tiga) Deputi, serta 3 (tiga) Staf Ahli. Dalam Peraturan Presiden tersebut, turut diatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Badan

Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

3. Capaian *Output* Strategis Lainnya

a. *Output Legal opinion* atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN

Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan dalam mencapai Rincian Output (RO) *Legal Opinion* membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp1.881.208.000 dengan realisasi sebesar Rp1.853.666.724 (dengan target output 2 Badan Usaha dan tercapai 59 Badan Usaha yang dilakukan *legal opinion*). Dua diantaranya adalah Rekomendasi BUMN mengenai Permohonan Persetujuan *Debt to Equity Swap* PT Pos Logistik Indonesia dan Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait macetnya pembayaran atas Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Tujuh Ruas Tol dari PT Waskita Karya (persero) Tbk.

- Permohonan Persetujuan *Debt to Equity Swap* PT Pos Logistik Indonesia

Penyertaan Modal melalui *Debt to Equity Swap* merupakan salah satu langkah transformasi yang dilakukan oleh PT Pos yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja anak perusahaan secara berkelanjutan melalui transformasi perbaikan bisnis PT Pos Logistik Indonesia. Didukung dengan struktur keuangan yang memadai melalui penyertaan modal, PT Pos Logistik Indonesia akan memiliki kapabilitas untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan tujuan utama menjadi 4L Logistics Company melalui program/strategi utama diantaranya strategi peraihan pendapatan, strategi efisiensi biaya, strategi peningkatan investasi dan strategi pendanaan.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output
606538	Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN	1.881.208.000	1.853.666.724	98,54%	Legal Opinion

b. *Output Laporan Keuangan Gabungan* BUMN

Asisten Deputi Bidang Keuangan dalam mencapai RO Laporan Kinerja BUMN membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp16.476.142.000 dengan realisasi sebesar Rp16.260.972.783 (99%). Atas anggaran tersebut dapat terealisasi 100% dari 4 (empat) target Rekomendasi Kebijakan, sebagaimana berikut:

1. Evaluasi *Roadmap* BUMN

Berdasarkan pasal 84 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,

dinyatakan bahwa dokumentasi perencanaan strategis BUMN salah satunya adalah Peta Jalan BUMN yang merupakan dokumen perencanaan untuk paling lama 10 (sepuluh) tahun yang berisi inisiatif strategis yang akan ditempuh oleh Kementerian BUMN dalam mengelola portofolio BUMN secara korporasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Roadmap 2020-2024 akan berakhir di tahun 2024 dan perlu disusun Roadmap 10 tahun ke depan yang berisi visi, misi dan tujuan strategis Kementerian BUMN, kekuatan dan kelemahan portofolio BUMN, tren global dan nasional, analisis kondisi terkini Portofolio BUMN beserta posisi kekuatan dan kelemahan internal, penjabaran strategi risiko serta strategi dan inisiatif strategis Roadmap BUMN. Kedeputan Keuangan dan Manajemen Risiko telah menyusun konsep analisa kondisi terkini per klaster dan inisiatif strategis Roadmap BUMN 2024-2034 yang diperoleh dari kompilasi kinerja Portofolio BUMN.

2. Aspirasi Pemegang Saham untuk RKAP BUMN

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 Paragraf 4 Pasal 97, telah disampaikan Aspirasi Pemegang Saham (APS) sebagai pedoman penyusunan RKAP BUMN Tahun 2024 sebagaimana Surat Menteri BUMN Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023. APS untuk RKAP Tahun 2024 mencakup arahan umum peta jalan BUMN 2020-2024, kebijakan strategi risiko Kementerian BUMN, penetapan aspek ESG dalam Kontrak Manajemen, asumsi ekonomi makro, visi dan misi kluster masterplan 2020-2024 dan arahan taktis RKAP tahun 2024, APS fungsi keuangan, manajemen risiko, TJSL, SDM, TI, hukum dan peraturan perundang-undangan, DPPK, arahan penggunaan produk dalam negeri, dan inisiatif strategis dan KPI klaster/sub klaster.

3. Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Kementerian BUMN terhadap 74 BUMN dalam portofolio Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memandang perlu disusunnya sebuah Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN yang mempertimbangkan eliminasi saldo dan transaksi antar BUMN untuk merefleksikan kinerja Portofolio BUMN secara keseluruhan. Laporan keuangan gabungan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing BUMN yang meliputi kinerja, risiko, dan prospek BUMN secara individu, kelompok dan keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan gabungan wajib disusun berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023. Penggabungan dilakukan oleh Kementerian BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-164/MBU/05/2021 dan SK Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor

SK-4/DKU.MBU/07/2023. Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Asurans Akuntan Independen berdasarkan Surat Pernyataan Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko PERNY-1/DKU.MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Surat Pernyataan Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN.

4. Konsep Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan BUMN

Dalam pengelolaan BUMN, diperlukan laporan keuangan yang menunjukkan saldo gabungan seluruh BUMN. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. BUMN memiliki potensi yang besar mengingat jumlah asset yang besar dan bergerak dalam berbagai macam sektor usaha. Dengan potensi yang besar, adanya laporan keuangan gabungan seluruh BUMN akan memudahkan pemegang saham dalam mengambil kebijakan dalam melakukan pembinaan BUMN karena saldo yang disajikan merupakan saldo riil yang dimiliki BUMN tanpa adanya berelasi antar grup BUMN. Pelaporan keuangan gabungan portofolio BUMN disusun berdasarkan PSAK, namun mengandung beberapa perbedaan utama dengan PSAK, di mana beberapa perbedaan bersifat permanen sehingga diperlukan standar pelaporan terpisah sampai ditemukan solusi perbaikan untuk secara penuh align dengan Indo GAAP.

Dalam rangka meningkatkan obyektivitas dan independensi atas laporan keuangan gabungan portofolio BUMN yang dihasilkan, maka diperlukan pemisahan atas pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan gabungan portofolio BUMN dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan akuntansi laporan keuangan gabungan portofolio BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN telah membentuk Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan berdasarkan SK-223/MBU/09/2022 dengan melibatkan tenaga ahli yang sudah memiliki pengalaman terkait pengembangan kebijakan akuntansi. Dalam penyusunan kebijakan akuntansi tersebut, Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan dibantu oleh konsultan dari Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PPA FEB UI) dengan mekanisme swakelola. Output dari pekerjaan bersama PPA FEB UI tersebut berupa kajian akademik yang relevan dalam penyusunan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Gabungan BUMN dan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Gabungan BUMN, kajian akademik terhadap isu relevan dalam penyusunan laporan keuangan gabungan yang dapat diaudit, dan kebijakan penyusunan laporan keuangan gabungan BUMN.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output
606538	Laporan Kinerja BUMN	16.476.142.000	16.260.972.783	98,69%	Rekomendasi Kebijakan

c. Output Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN

Asisten Deputi Bidang Keuangan Keuangan dalam mencapai RO Kebijakan Penetapan Dividen BUMN membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp164.424.000,00 dengan realisasi sebesar Rp156.687.006,00 (95%). Atas anggaran tersebut dapat terealisasi 100% dari target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, berupa Rekomendasi Kebijakan Penyampaian Rincian Optimalisasi Target PNBK KND TA 2024 dari Dividen BUMN di Bawah Kementerian BUMN sebagaimana Surat Asisten Deputi Bidang Keuangan Nomor S-14/DKU.MBU/A/12/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Berdasarkan perhitungan simulasi internal dengan memperhatikan realisasi kinerja BUMN pada Q3-2023 dan prognosa FY-2023, dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN untuk TA 2024 ditargetkan sebesar Rp85.169 Miliar. Secara umum, laba bersih portofolio BUMN selama Q3-2023 naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan 3 (tiga) klaster penyumbang laba terbesar adalah Klaster Jasa Keuangan, Industri Energi Minyak dan Gas serta Telekomunikasi. Kementerian BUMN berkomitmen untuk dapat memenuhi target secara keseluruhan.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output
606538	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN	164.424.000	156.687.006	95,29%	Rekomendasi Kebijakan

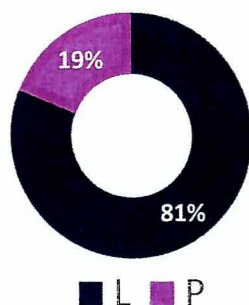
d. Output Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan

Asisten Deputi Manajemen SDM BUMN dalam mencapai RO Penetapan Direksi, Dewan Komisaris atau Pengawas membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp1.517.127.000 dengan realisasi sebesar Rp1.494.043.033 (98%). Atas anggaran tersebut dapat merealisasikan 44 Rekomendasi Kebijakan dari target 44. Secara umum bentuk produk rekomendasi kebijakan adalah berupa Surat Keputusan Menteri BUMN.

- Presentase Pemenuhan Talent Pool Bakal Calon Direksi sesuai Standar Kompetensi.

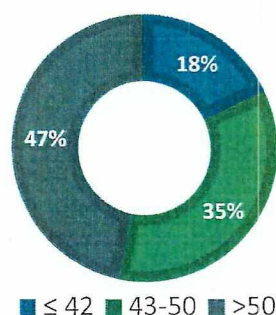
Pemenuhan Talent Pool Talenta Direksi BUMN secara berkala telah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Begitu pula pada Tahun 2023, melalui surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Nomor S-34/DSI.MBU/02/2023 tanggal 10 Februari 2023, BUMN diminta untuk menyampaikan usulan Top 20% Talenta BOD-1 dalam rangka updating Talent Pool Kementerian BUMN. Penyampaian daftar talenta tersebut selain disampaikan melalui surat resmi kepada Kementerian BUMN, juga diminta untuk dilengkapi datanya dalam Portal HC Kementerian BUMN.

TALENT BY GENDER



Laki-Laki	:	720
Perempuan	:	192
Total	:	912

TALENT BY AGE



≤ 42	:	164
43 – 50	:	322
>50	:	426
Total	:	912

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap daftar talenta yang dikirimkan oleh BUMN kepada Kementerian BUMN, diketahui bahwa jumlah talenta BUMN tahun 2023 adalah sebanyak 912 orang, dengan detail berdasarkan jenis kelamin dan usia sebagai berikut:

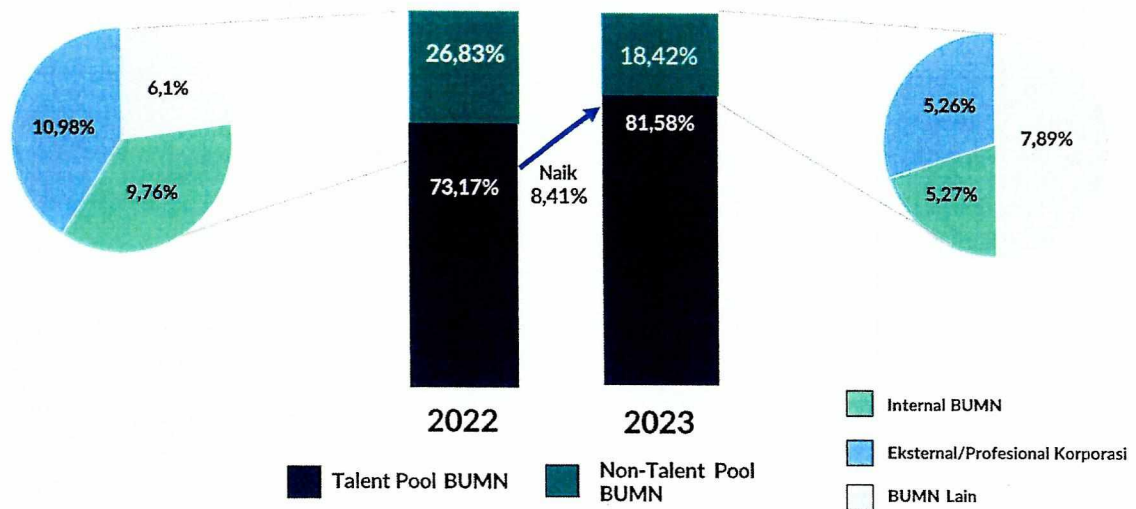
Laki-Laki	Perempuan
720	192

≤42	43-50	51-60
164	322	426

Gambar

Demografi Talenta BUMN 2023

Pada tahun 2023, juga terjadi kenaikan persentase pengangkatan Direksi BUMN yang berasal dari Talent Pool.



Berdasarkan data per Desember 2023, pengangkatan Direksi BUMN dari Talent Pool mengalami kenaikan sebesar 8,41% dibandingkan tahun 2022, yang sebelumnya pada tahun 2022 persentase pengangkatan Direksi BUMN sebesar 73,17%, pada tahun 2023, naik menjadi 81,58%.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output
606538	Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan	1.517.127.000	1.494.043.033	98,48%	Rekomendasi Kebijakan

e. **Output Kebijakan Penguatan Daya Saing dan Penugasan BUMN**

Dalam melaksanakan pembinaan daya saing BUMN, Keasdepan Teknis Menyusun beberapa rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan pembinaan BUMN dalam lingkup masing-masing klaster, diantaranya:

- Rekomendasi Kebijakan Dukungan Peningkatan Elektrifikasi
- Dukungan Percepatan Proyek Smelter Grade Alumina Refinery
- Pembentukan Project Management Office restrukturisasi bisnis dan keuangan BUMN Farmasi
- Pembentukan Project Management Office Restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan
- Kebijakan Penugasan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Transformasi PT Rekayasa Industri dalam Rangka Penyehatan Perusahaan
- Pengembangan segmen bisnis global PT Bank Syariah Indonesia
- Sinergi Pemanfaatan Aset BUMN
- Program Penyelamatan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- Kebijakan Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya

- Kebijakan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional / "PT PANN
- Kebijakan Persetujuan Rancangan Penggabungan BUMN Transportasi Jalan

Output rekomendasi kebijakan tersaji sebagai berikut:

No	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	%
1	4407.ABA.002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas	316.142.000	316.141.907	100%	2	3	150%
2	4408ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara	110.189.000	10.188.780	100%	3	10	333%
3	4409ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Kesehatan	138.153.000	37.850.535	100%	2	10	500%
4	4410ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Manufaktur	132.861.000	132.861.000	100%	2	2	100%
5	4412ABA'002	Rumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing BUMN Sektor Jasa Keuangan	229.755.000	229.755.000	100%	1	1	100%
6	4413ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	62.057.000	62.057.000	100%	2	2	100%
7	4414ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	125.250.000	125.046.683	100%	2	2	100%
8	4415ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	175.403.000	175.404.000	100%	2	2	100%
9	4416ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	240.230.000	240.229.400	100%	3	3	100%
10	4828ABA'002	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	140.611.000	140.602.000	100%	1	5,3	530%
11	6601ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	311.748.000	310.744.700	100%	1	1	100%
12	6602ABA'002	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Logistik	208.438.000	208.860.150	100%	1	1	100%

Adapun uraian masing-masing output rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

e.1. Rekomendasi Kebijakan Dukungan Peningkatan Elektrifikasi

Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas memiliki rincian output Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas dengan menggunakan anggaran sebesar Rp316.141.907,00 atau 100% dari Rp316.142.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output diantaranya:

- a) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-180/MBU/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Persetujuan Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Melaksanakan Program Penyediaan Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
- b) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor S-190/MBU/04/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Persetujuan atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi 100%. Program tersebut diperuntukan bagi rumah tangga tidak mampu dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Pelaksanaan Program BPBL tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-79/TL.03/MEM.L/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penugasan kepada PT PLN (Persero). Dalam pelaksanaannya Tahun 2023, Program BPBL akan diberikan kepada 83.000 rumah tangga tidak mampu dengan daya pelanggan 450 VA. Adapun total anggaran dalam pelaksanaan Program BPBL sebesar Rp183.776.840.000,00.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu bahwa kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan melalui penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) "PT PLN". Sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN dimana penugasan perlu adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri BUMN. Untuk itu, dalam mendukung Program BPBL dalam rangka

percepatan pencapaian rasio elektrifikasi nasional 100%, pengurangan *over supply* Listrik dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, terbit Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-180/MBU/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Persetujuan Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Melaksanakan Program Penyediaan Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral "Menteri ESDM" memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) "PT PLN" melalui Surat Menteri ESDM Nomor T-655/TL.04/MEM.L/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam Rangka Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara dari Indonesia ke Papua Nugini kepada PT PLN (Persero). Adapun penugasan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan Listrik di Wilayah Vanimo, Papua Nugini dalam bentuk ekspor Listrik dari excess power maksimal 5 MW yang terbagi ke dalam 2 tahap:

- a) Tahap I pemenuhan kebutuhan listrik ke wilayah Wutung, Papua Nugini yang ditargetkan terealisasi pada tanggal 17 Agustus 2023;
- b) Tahap II pemenuhan kebutuhan listrik sampai ke wilayah Vanimo, Papua Nugini.

Untuk menindaklanjuti penugasan tersebut, PT PLN diharuskan melakukan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan total investasi sebesar Rp2.400.015.700,00 berupa:

- a) Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dan Kubikel Gardu Hubung (GH) di Pos Lintas Batas Skouw.
- b) Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah ke Papua Nugini.

Dipastikan bahwa dengan penugasan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap PT PLN maupun negara karena harga jual Listrik maksimal 20 cent USD/kWh di atas Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) sebesar 19,48 cent USD/kWh, sehingga potensial revenue yang diperoleh mencapai Rp3.500.000.000,00/bulan. Selanjutnya, dalam mendukung penugasan tersebut diterbitkan Surat Dukungan Penugasan kepada PT PLN.

e.2. Dukungan Percepatan Proyek Smelter Grade Alumina Refinery

Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara memiliki rincian output 4408.ABA.002 Rumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara dan 4408.ABA.003 Rumusan Kebijakan Penugasan BUMN Sektor Industri dengan menggunakan anggaran sebesar Rp315.654.559,00 atau 98,99% dari

anggaran sebesar Rp318.873.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 4 (empat) Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output sebagai berikut:

- a) Keputusan Menteri BUMN Nomor SK- 286/MBU/10/2023 perihal Pembentukan Tim Pengamanan Wilayah Kerja Pertambangan Badan Usaha Milik Negara Klaster Mineral dan Batubara. Pembentukan Tim Pengamanan Wilayah Kerja Pertambangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Memorandum of Understanding yang dilaksanakan antara Kementerian BUMN, melalui Menteri BUMN Erick Thohir, dengan Tentara Nasional Indonesia, melalui Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.. Adapun Tim ini dibentuk dengan ditujukan untuk optimalisasi sumber daya BUMN, Anak Perusahaan BUMN, perusahaan afiliasi BUMN, dan TNI dalam hal pengamanan aset BUMN.
- b) Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-287/MBU/10/2023 perihal Pembentukan Tim Percepatan Proyek-Proyek Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara Klaster Mineral dan Batubara. Tim Percepatan Proyek-Proyek Kerja Sama BUMN Klaster Minerba (Tim Proyek Minerba) dibentuk untuk memfasilitasi dukungan stakeholder yang dibutuhkan untuk percepatan penyelesaian proyek. Tim Proyek Minerba telah mendorong Proyek Sumsel-8 untuk commissioning pada Q4 2023, Proyek Smelter Grade Alumina Refinery mendapatkan status PSN pada Q4 2023, dan memberikan dukungan-dukungan percepatan lainnya pada berbagai proyek BUMN di Klaster Mineral dan Batuabara.
- c) Surat Menteri BUMN NOMOR SK-302/MBU/10/2023 perihal Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tim Percepatan Restrukturisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (PT KS) dibentuk untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam hal restrukturisasi PT KS. Adapun restrukturisasi PT KS yang sudah dijalankan selama 4 tahun terakhir memberi dampak positif hingga tahun buku 2022. Namun pada Mei 2023, terjadi kebakaran di pabrik utama PT KS yaitu Pabrik Hot Strip Mill#1 yang sangat berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan saat ini, sedangkan PT KS masih memiliki kewajiban keuangan yang perlu diselesaikan hingga beberapa tahun ke depan, sehingga SK ini perlu diterbitkan kembali.

e.3. Pembentukan Project Management Office restrukturisasi bisnis dan keuangan BUMN Farmasi

Keasdepan Bidang Industri Kesehatan memiliki 2 (dua) rincian output yaitu Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp137.850.535,00 atau 99,78% dari pagu anggaran sebesar

Rp138.153.000,00 dan rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Industri Kesehatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp84.135.883,00 atau 99,22% dari Rp84.795.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 5 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk output berupa:

Rincian Output 4409.ABA.002 Rumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing BUMN Sektor Industri Kesehatan

- a) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-274/MBU/10/2023 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Reorientasi Bisnis Grup PT Bio Farma (Persero).

Pembentukan Project Management Office (PMO) ini untuk melakukan percepatan penataan bisnis di Bio Farma Group antara lain terkait penataan produk, bisnis perusahaan, manufaktur, komersial, struktur organisasi dan SDM. Diharapkan dengan adanya PMO ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor dalam industri sejenis.

- b) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-273/MBU/10/2023 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi Keuangan Grup PT Bio Farma (Persero).

Pembentukan Project Management Office (PMO) ini untuk menyusun dan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap kondisi keuangan dan optimalisasi aset-aset perusahaan pada Bio Farma Group.

Rincian Output 4409.ABA.003 Rumusan Kebijakan Penugasan BUMN Sektor Industri Kesehatan

- a) Surat Wakil Menteri BUMN I Nomor S-31/Wk1.MBU/05/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bio Farma (Persero) periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
- b) Surat Wakil Menteri BUMN Nomor S-8/Wk.K.MBU/08/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) Periode s.d. Triwulan II 2023.
- c) Surat Wakil Menteri BUMN Nomor S-38/Wk.K.MBU/12/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) Periode s.d. Triwulan III 2023.

e.4. Pembentukan Project Management Office Restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan

Keasdepan Industri Manufaktur memiliki rincian output Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Manufaktur dengan menggunakan

anggaran sebesar Rp132.861.000 atau 100% dari Rp132.861.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa:

- a) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-291/MBU/10/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyehatan Keuangan PT PAL Indonesia dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-292/MBU/10/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyehatan Keuangan PT Dirgantara Indonesia.
- b) Surat Menteri BUMN Nomor S-30/MBU/01/2023 perihal persetujuan Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Len Industri (Persero) dan Surat Menteri BUMN Nomor S-650/MBU/12/2023 perihal persetujuan Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Len Industri (Persero).

Pembentukan Tim Percepatan Penyehatan Keuangan tersebut didasarkan untuk membantu pencapaian target utama Holding BUMN Industri Pertahanan/"Defend ID" menjadi Top 50 Global Defence Company yang saat ini masih memiliki hambatan karena terdapat anak perusahaan Holding Defend ID yang memiliki tantangan dan permasalahan utama sebagai berikut:

- a) Tingginya utang berbunga masa lalu (sebagian besar bersifat unsustained), plafond fasilitas pinjaman eksisting yang terbatas dan sudah habis, kondisi likuiditas yang minim, serta adanya isu covenant yang menghambat perolehan pinjaman baru. Pada tahun 2022, Defend ID mencatatkan utang berbunga sebesar Rp16,8 triliun, Debt to Equity ratio sebesar 2,9x, dan Debt to EBITDA sebesar 7,4x.
- b) Karakteristik proyek Defend ID sebagian besar bersifat multiyears dan membutuhkan modal kerja cukup besar serta margin keuntungan yang cenderung rendah akibat menanggung beban pendanaan yang tinggi. Pada tahun 2022, Defend ID mencatatkan Inventory Days selama 192 hari, Net Profit Margin sebesar 2,4%, dan beban bunga bank sebesar Rp773,0 miliar.
- c) Permasalahan signifikan terkait aset dan sengketa hukum pada Defend ID yang hingga saat ini belum tuntas terselesaikan, antara lain: tumpang tindih kepemilikan aset tanah PTDI dengan TNI AU dan sengketa kepemilikan lahan eks proyek N250, serta sengketa bisnis proyek terminasi PT PAL dengan Mediterranea Italia dan Lauterjung Jerman.
- d) Di antara 5 anggota entitas Defend ID, PT Dirgantara Indonesia/"PTDI" dan PT PAL Indonesia/"PT PAL" dinilai perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas untuk dilakukan percepatan penyehatan keuangan Hal ini utamanya ditunjukkan

dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- PTDI: Sejak Pemerintah tidak lagi memberikan bantuan operasional akibat krisis tahun 1997, PTDI mengalami kerugian besar dan berkepanjangan sehingga total akumulasi rugi pada tahun 2022 tercatat sebesar USD1.385,3 juta (~Rp21,6 triliun). PTDI juga memiliki beban utang yang tinggi yaitu total sebesar USD532,8 juta (~Rp8,3 triliun) yang sebagian besar merupakan utang berbunga sebesar USD234,4 juta (~Rp3,7 triliun)
- PT PAL: Sejak terjadinya lonjakan harga material (steel plate) pada tahun 2006 – 2008, PT PAL mengalami 7 terminasi proyek strategis akibat kelangkaan material kapal dan harga kontrak yang tidak bisa disesuaikan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya utang unsustained yang cukup besar (mencapai Rp3,3 triliun) dalam bentuk US Dolar sehingga fluktuasi nilai tukar (kurs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Saat ini, PT PAL memiliki kontrak on hand sebesar Rp32,4 triliun dengan kebutuhan modal kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain, PT PAL masih dalam status Kolektibilitas-2 (dalam perhatian khusus) sehingga menyulitkan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan baru guna membiayai proyek pekerjaan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pembentukan Tim Project Management Office (PMO) Percepatan Penyehatan Keuangan PTDI dan PT PAL, sehingga implementasi program penyehatan keuangan kedua perusahaan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan optimal hasilnya.

e.5. Kebijakan Penugasan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Keasdepan Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan memiliki rincian output Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Perkebunan dan Kehutanan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp175.404.000.000 atau 100% dari Pagu. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa:

- a) PP Nomor 52 Tahun 2023 Perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- b) SK-312/MBU/11/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Program Biofuels, Energy Transition Mechanism (ETM), Reforestasi, Nature-Based Solutions (NBS), serta Carbon Capture Storage (CCS) dan CCUS

Pada tahun 2023, PTPN Group melakukan integrasi anak usaha PTPN berdasarkan komoditas melalui penggabungan anak perusahaan dengan membentuk 3 sub holding yaitu PalmCo, SupportingCo dan SugarCo. Sebagai dampak atas penggabungan tersebut, luasan lahan per masing-masing komoditas di PTPN Grup menjadi melebihi batas maksimal luasan lahan perkebunan sesuai PP 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertanian di mana pada Pasal Pasal 3 (1) mengatur batasan luasan maksimal untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

- a) Kelapa Sawit maksimum 100.000 Ha,
- b) Tebu maksimum 125.000 Ha,
- c) Karet maksimum 23.000 Ha,
- d) Teh maksimum 14.000 Ha,
- e) Kopi maksimum 13.000 Ha.

sehingga diperlukan revisi atas PP 26/2021 tersebut. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan antar Kementerian membahas draft revisi PP tersebut dan pada tanggal 10 November 2023 telah terbit PP Nomor 52 Tahun 2023 Perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dimana substansi perubahannya adalah sebagai berikut:

- a) Pengecualian batasan luas maksimum perusahaan perkebunan yang merupakan badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Penugasan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk melakukan pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan pekebun, memodernisasi industri perkebunan, dan/atau tujuan strategis lain yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Sebagai tindak lanjut penugasan sebagaimana disebutkan dalam PP 52/2023, Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan. Pada Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, Menteri dapat menugaskan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN.

e.6. Transformasi PT Rekayasa Industri dalam Rangka Penyehatan Perusahaan

Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk memiliki rincian output berupa Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk dengan realisasi anggaran sebesar Rp175.320.319,00 atau 99,65% dari pagu anggaran sebesar Rp175.932.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk output berupa:

- a) Nota Dinas Nomor: ND-8/Wk1.MBU/01/2023 perihal Laporan Kondisi Keuangan dan Rencana Restrukturisasi Keuangan PT Rekayasa Industri. Nota Dinas tersebut disusun untuk menyampaikan kondisi keuangan dan rencana restrukturisasi keuangan PT Rekayasa Industri. Diharapkan dengan adanya Nota Dinas tersebut dapat mendorong pelaksanaan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri.
- b) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-276/MBU/10/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri. Dengan dibentuknya tim tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri.
- c) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/Wk.K/12/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-276/MBU/10/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri. Dengan dibentuknya tim tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri.
- d) Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Rekayasa Industri Nomor: SK-1/MBU/01/2024 perihal Persetujuan Rencana Penyehatan Perusahaan.

Melalui Nota Dinas pada poin a, Wakil Menteri BUMN I menyampaikan kepada Menteri BUMN mengenai kondisi PT Rekayasa Industri sampai akhir 2022 yang didalamnya memuat penurunan kinerja dalam 4 tahun terakhir, penyebab kerugian dalam 3 tahun terakhir, kewajiban yang harus diselesaikan, hasil audit khusus atas proyek-proyek yang dikerjakan, pencapaian Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan, inisiatif yang akan dilakukan agar cashflow tetap positif ke depannya, langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan negatif ekuitas, proses Restrukturisasi Rekind, dan permintaan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Rekayasa Industri untuk menyusun Buku Putih terkait dengan rencana restrukturisasi dan upaya penyelamatan Rekind.

Tim Percepatan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri BUMN pada poin b dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri

BUMN pada poin c. Tim tersebut terdiri dari Tim Pengarah, Organizing Committee, Project Management Office (PMO). Dengan dibentuknya tim tersebut, segala inisiatif yang akan dilakukan dalam Restrukturisasi Rekind dimonitoring secara berkala.

Salah satu langkah dalam Restrukturisasi Rekind adalah Persetujuan Rencana Penyehatan Perusahaan oleh para pemegang saham PT Rekayasa Industri yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan Negara Republik Indonesia. Melalui Surat pada poin d, para pemegang saham pada prinsipnya menyetujui rencana restrukturisasi dalam rangka penyehatan keuangan Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam buku Rencana Penyehatan Keuangan: Transformasi Rekind dalam Rangka Penyehatan Perusahaan EPCC Nasional untuk Terus Berkontribusi pada Pembangunan Industri di Indonesia. Rencana penyehatan tersebut agar dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Rekayasa Industri. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, ketercukupan aspek manajemen risiko, tata kelola keuangan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta Tanggapan Dewan Komisaris yang terkait.

e.7. Pengembangan segmen bisnis global PT Bank Syariah Indonesia

Keasdepan Jasa Keuangan memiliki rincian output Rumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing BUMN Sektor Jasa Keuangan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp229.755.000 atau 100% dari Rp229.755.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 1 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa Surat Kuasa Nomor SK-203/MBU/07/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Nilai PT Bank Syariah Indonesia Tbk melalui Aksi Korporasi. Tim dibentuk dalam rangka mendukung aspirasi agar PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menjadi bank syariah berskala global dengan melakukan ekspansi ke segmen bisnis baru melalui kolaborasi dengan investor strategis. PT Bank Syariah Indonesia (Tbk) telah melakukan non-deal roadshow ke investor dari berbagai negara dalam rangka mencari strategic investor.

e.8. Sinergi Pemanfaatan Aset BUMN

Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur memiliki rincian output Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur dengan menggunakan anggaran sebesar Rp62.057.000 atau 100% dari Rp62.057.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 dokumen Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa:

- a) Surat Nomor S-17/Wk.2.MBU/03/2023 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Sinergi Pemanfaatan Aset BUMN
- b) SK-87/MBU/04/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur melalui surat Wakil Menteri BUMN II menyampaikan permohonan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mendorong universitas bekerjasama dengan BUMN Jasa Infrastruktur dalam hal pemanfaatan aset yang dimiliki oleh BUMN Jasa Infrastruktur. Aset yang dimiliki oleh BUMN Jasa Infrastruktur memiliki lokasi berdekatan dengan universitas, sehingga berpotensi untuk dapat dikerjasamakan dengan universitas, antara lain sebagai berikut:

No	BUMN	Aset	Potensial Universitas
1.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Tamansari Cendekia	Universitas Negeri Semarang Universitas Diponegoro
2.	Perum Perumnas	Samesta Dramaga Bogor	Institut Pertanian Bogor
		TOD Pondok Cina	Universitas Indonesia Universitas Negeri Jakarta
3.	PT PP (Persero) Tbk	Evencio Apartment	Universitas Indonesia Universitas Negeri Jakarta
		Begawan Apartment	Universitas Brawijaya Universitas Negeri Malang
		Louvin Apartment	Insitiut Teknologi Bandung Universitas Padjajaran
		Grand Dhamahusada Lagoon	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Airlangga Universitas Negeri Surabaya
		Alton Apartment	Universitas Negeri Semarang Universitas Diponegoro
4.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dhika Universe Malang	Universitas Brawijaya Universitas Muhammadiyah Malang
		Taman Melati Jatinangor	Insitiut Teknologi Bandung Universitas Padjajaran
		Taman Melati Surabaya MERR	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Airlangga
		Dhika Universe Sardjito	Universitas Gadjah Mada Universitas Islam Indonesia

Dengan adanya surat tersebut, diharapkan aset persediaan yang dimiliki oleh BUMN Jasa Infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah kepada BUMN Jasa Infrastruktur.

e.9. Program Penyelamatan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/"PT BPUI" selaku holding asuransi dan penjaminan mendapat mandat dari Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/"PT Jiwasraya". Sejalan dengan penugasan tersebut, pada tahun 2021, PT BPUI telah menerima dana PMN sebesar Rp20 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam mendukung penguatan

industri asuransi termasuk penyelesaian polis PT Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dan/atau dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life" sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021. Selain pemanfaatan dana PMN sebesar Rp20 triliun, PT BPUI juga melakukan fundraising internal sebesar Rp6,7 triliun guna memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka pengalihan polis PT Jiwasraya ke IFG Life. Atas penambahan modal tersebut, selanjutnya IFG Life menerima pengalihan portofolio aset dan liabilitas (polis) yang telah direstrukturisasi di PT Jiwasraya untuk dilanjutkan pengelolaan dan pembayaran manfaatnya. Namun demikian, terdapat keterbatasan kapasitas keuangan IFG Life dalam menerima sisa portofolio yang dapat terlihat dari tingkat RBC yang mendekati tingkat RBC sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan masih terdapatnya liabilitas yang belum dialihkan, Presiden dalam rapat internal pada tanggal 21 September 2022 menyampaikan arahan untuk memastikan seluruh permasalahan tuntas sehingga tidak terdapat permasalahan lagi dengan PT Jiwasraya. Adapun menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut, berikut beberapa hal yang tidak terlepas ke dalam capaian output strategis dari Keasdepan Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai berikut:

a) Permohonan Dukungan Program Penyelamatan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Dalam rangka mendukung langkah dan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan penyelamatan polis PT Jiwasraya, maka Direksi PT BPUI memandang perlu untuk melakukan sosialisasi atas langkah dan kebijakan dari Pemerintah dalam proses penyelesaian polis PT Jiwasraya kepada lembaga atau instansi Pemerintah yang terkait, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Direksi PT BPUI melalui suratnya memohon kesediaan dan dukungan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham PT BPUI untuk membantu dan menjembatani secara kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi langkah dan kebijakan Pemerintah dalam proses penyelesaian polis PT Jiwasraya dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas hal tersebut, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-455/MBU/09/2023 tanggal 8 September 2023 hal Permohonan Dukungan Program Penyelamatan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberikan dukungan terkait sosialisasi atas langkah dan kebijakan dari Pemerintah dalam proses penyelesaian polis PT Jiwasraya di lingkungan Mahkamah Agung, agar terbentuk persamaan persepsi dan sudut

pandang atas langkah dan kebijakan Pemerintah dalam proses penyelesaian polis PT Jiwasraya.

e.10. Kebijakan Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya

Keasdepan Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung memiliki rincian output “Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung” dengan menggunakan anggaran sebesar Rp240.229.400 atau 100% dari anggaran. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 3 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa:

- a) Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/Wk2/02/2023 Perihal Perubahan Atas Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-292/MBU/12/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Transformasi Pelayanan, Bisnis, dan Operasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam rangka menciptakan pelayanan berkualitas oleh BUMN sekaligus mendorong pemulihan dan pengembangan industri aviasi dan pariwisata nasional perlu dilakukan transformasi atas pelayanan, bisnis, dan operasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk mewujudkan transformasi tersebut dibentuk Tim Percepatan Transformasi Pelayanan, Bisnis, dan Operasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah (steering committee), Organizing Committee (OC), dan Project Management Office (PMO) yang diharapkan dapat mewujudkan transformasi yang optimal dengan mengacu pada level of service bandar udara kelas dunia.
- b) Kajian Penyusunan Peraturan Presiden sebagai Pengganti Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Dalam rangka penataan pengelolaan Kawasan Borobudur, dilakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Adapun penggantian Keputusan Presiden tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi Arahan Presiden Republik Indonesia dalam beberapa rapat terbatas tentang Pengembangan Destinasi Borobudur, mewujudkan pengelolaan yang terintegrasi di Kawasan Cagar Budaya, dan mewujudkan Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur dan Kawasan Cagar Budaya Candi Prambanan dengan

mengembangkan unsur-unsur konservasi, spiritual, edukasi dan ekonomi pariwisata.

- c) Tanggapan atas Penyerapan Dana PMN Triwulan II 2023 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pemberian dukungan dari pemerintah kepada Garuda Indonesia dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Garuda Indonesia dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi untuk penyelamatan Garuda Indonesia melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Garuda Indonesia.

e.11. Kebijakan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional / "PT PANN"

Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media memiliki rincian output berupa rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media dengan menggunakan anggaran sebesar Rp310.744.700 atau 99,68% dari Rp311.748.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 1 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa Surat Menteri BUMN kepada Presiden RI Nomor: S-626/MBU/12/2023 perihal Permohonan Penetapan Presiden atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional / "PT PANN", sebagai bagian dari rangkaian proses pembubaran PT PANN (Persero) yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder PT PANN (Persero). Pembubaran PT PANN (Persero) dilakukan dengan pertimbangan penurunan kinerja perusahaan yang tidak menunjukkan penyehatan atau perbaikan sehingga dinilai tidak dapat dipertahankan.

e.12. Kebijakan Persetujuan Rancangan Penggabungan BUMN Transportasi Jalan

Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Logistik dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.033.364 atau 99% dari Rp190.273.000. Atas anggaran telah merealisasikan 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dari target 1 (satu) berupa Surat Menteri BUMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: S-552/MBU/11/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Penerimaan Pinjaman dalam Pemenuhan Kenaikan Biaya (*Cost Overrun*) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Penerimaan fasilitas pinjaman dari China Development Bank dengan penjaminan oleh Pemerintah merupakan salah satu bentuk pendanaan selain

melalui ekuitas dalam rangka pemenuhan biaya cost overrun Proyek KCJB. Atas hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pimpinan Konsorsium Indonesia dalam Proyek KCJB melakukan permohonan persetujuan penerimaan pinjaman kepada RUPS. PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu untuk melakukan penguatan keuangan perusahaan dengan menambah sumber pendanaan yang berasal dari kegiatan di luar angkutan penumpang yang dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu melalui angkutan barang utamanya angkutan batu bara dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif angkutan batu bara.

f. Penugasan BUMN (003)

Dalam melaksanakan pembinaan daya saing BUMN, Keasdepan Teknis Menyusun beberapa rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan penugasan BUMN dalam lingkup masing-masing klaster, diantaranya:

- Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Rekomendasi Kebijakan Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk.
- Evaluasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara
- Penerbitan Medium Term Notes PT Len Industri (Persero)
- Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol
- Kebijakan Penugasan dalam Proyek Kawasan Industri Pupuk Fafak
- Persetujuan Restrukturisasi Perbankan PT Wijaya Karya (Persero).
- Kebijakan Dukungan Tambahan Penyertaan Modal Negara
- Relaksasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Entitas Holding Ultra Mikro
- Penyelesaian Proyek Kawasan KEK Mandalika
- Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
- Pendanaan Untuk Kenaikan Biaya (Cost Overrun) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Rincian output rekomendasi kebijakan tersaji sebagai berikut:

No	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	%
1	4407ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas	75.429.000	75.429.000	100%	2	8,2	410%
2	4408ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara	208.684.000	205.465.779	98%	1	5	500%
3	4409ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Industri Kesehatan	84.795.000	84.135.883	99%	1	6	600%
4	4410ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Manufaktur	97.774.000	97.773.220	100%	1	1	100%

No	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	%
5	4412ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Keuangan	307.814.000	307.814.000	100%	2	2	100%
6	4413ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	83.953.000	83.953.000	100%	1	1	100%
7	4414ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	209.592.000	209.591.017	100%	2	2	100%
8	4415ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	156.353.000	156.180.550	100%	2	2	100%
9	4416ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	458.864.000	458.863.500	100%	1	1	100%
10	4421ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	164.424.000	156.687.006	95%	1	1	100%
11	6601ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	39.368.000	39.368.000	100%	1	1	100%
12	6602ABA'003	Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Logistik	190.273.000	189.033.364	99%	1	1	100%

Adapun uraian masing-masing output rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

f.1. Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero)

Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas dengan menggunakan anggaran sebesar Rp75.429.000,00 atau 100% dari Rp75.429.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output diantaranya:

- a) Surat Menteri BUMN kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 76/MBU/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Persetujuan Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero);
- b) Surat Menteri BUMN kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: S-419/MBU/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Dukungan Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

f.2. Rekomendasi Kebijakan Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk

Surat Menteri BUMN Nomor SR-498/MBU/10/2023 perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Terbatas Kabinet terkait Rencana Divestasi Saham PT Vale

Indonesia Tbk. Saat ini, terdapat rencana konsolidasi atas kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk oleh Vale Canada Limited (VCL), MIND ID, Sumitomo Metal Mining (SMM), dan publik (e.g. individu, lembaga keuangan/retail). Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah issue yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait status PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan publik yang juga mengharuskan pembagian aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dari operasi perusahaan untuk dibagi secara proporsional juga kepada pemilik saham minoritas/publik, sehingga pada saat ini sedang dilakukan diskusi secara intensif dengan pihak Vale Canada terkait konsolidasi. Sebagai tindak lanjut atas issue tersebut, maka dilakukan pengajuan permohonan pelaksanaan Rapat Kabinet kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia untuk membahas mengenai rencana divestasi PT Vale Indonesia Tbk tersebut.

f.3. Evaluasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara

- a) Surat Wakil Menteri BUMN I Nomor S-31/Wk1.MBU/05/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bio Farma (Persero) periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
- b) Surat Wakil Menteri BUMN Nomor S-8/Wk.K.MBU/08/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) Periode s.d. Triwulan II 2023.
- c) Surat Wakil Menteri BUMN Nomor S-38/Wk.K.MBU/12/2023 Perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) Periode s.d. Triwulan III 2023. PT Bio Farma (Persero) telah menerima tambahan dana PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2 Triliun pada tahun 2020 berdasarkan PP No 80 Tahun 2020. Dana PMN ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional, baik melalui PT Bio Farma (Persero) maupun anak dan cucu perusahaan serta melalui pengambilalihan sebagian kepemilikan di PT Pertamina Bina Medika IHC.

f.4. Penerbitan Medium Term Notes PT Len Industri (Persero)

Penerbitan MTN didasarkan oleh kajian kelayakan yang mencakup aspek keuangan, bisnis, legal, dan manajemen risiko yang menyatakan penerbitan MTN PT Len Industri (Persero) Tahap I dan Tahap II layak dilakukan. Penerbitan MTN memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja Defend ID di masa mendatang, baik dari sisi profitabilitas dan solvabilitas. Penerbitan MTN merupakan alternatif pendanaan yang

paling memungkinkan dan cepat bagi PT Len Industri (Persero) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang sudah diperoleh. Kondisi keuangan Defend ID saat ini sulit untuk mendapatkan tambahan fasilitas pendanaan dari perbankan. Sulitnya memperoleh tambahan fasilitas pendanaan dari perbankan utamanya karena PT Len Industri (Persero), PT DI dan PT PAL dalam kondisi restrukturisasi/reprofiling utang bank, sedangkan untuk PT Pindad dan PT Dahana plafon pinjaman eksisting juga sudah penuh serta adanya isu *covenant*.

Penerbitan MTN sangat dibutuhkan oleh Defend ID untuk mendukung pencapaian target-target RKAP 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Tanpa adanya tambahan modal kerja, kinerja keuangan Defend ID akan tidak optimal dan berpotensi mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena terhambatnya progress pengerjaan proyek-proyek yang sudah diperoleh Defend ID yang akan berdampak pada penurunan perolehan pendapatan, peningkatan biaya (cost overrun dan denda/pinalti keterlambatan), serta berkurangnya kepercayaan pemilik proyek (Kementerian Pertahanan/TNI dan pemberi kontrak).

Adapun struktur MTN yang diterbitkan sebagai berikut:

a) MTN Tahap I

Nilai MTN diterbitkan : Rp350 miliar

Tenor : 3-4 Tahun

b) MTN Tahap II

Nilai MTN diterbitkan : Rp200 miliar

Tenor : 5 Tahun

f.5. Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol

Keasdepan Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan memiliki rincian output Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN sektor Perkebunan dan Kehutanan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp156.352.000.000 atau 99,89% dari pagu sebesar Rp156.180.550.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa:

- a) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- b) SK-345/MBU/12/2023 Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangan dan Energi

f.6. Pelaksanaan PKT Kebijakan Penugasan dalam Proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak

Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk memiliki rincian output berupa Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk dengan menggunakan anggaran sebesar Rp140.602.000,00 atau 99,99% dari Rp140.611.000,00. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk output berupa:

- a) Surat Menteri BUMN Nomor: S-206/MBU/04/2023 Perihal Dukungan Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Fakfak. Surat Menteri BUMN tersebut disusun sebagai bentuk dukungan Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam memberikan penugasan kepada PT PKT selaku pelaksana dan penanggungjawab pengembangan PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak dengan mengacu pada kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Diharapkan dengan adanya Surat tersebut dapat mendorong pelaksanaan PSN Kawasan Industri Fakfak.

Kawasan Industri Pupuk Fakfak ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional/"PSN" dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan Surat Permohonan Dukungan dalam PSN Kawasan Industri Fakfak dan Surat Penugasan PT Pupuk Kalimantan Timur dalam Pelaksanaan PSN Kawasan Industri Fakfak. Melalui surat poin a, Menteri BUMN mendukung PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam memberikan penugasan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur selaku pelaksana dan penanggungjawab pengembangan PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak dengan mengacu pada kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memperoleh fasilitas kemudahan sebagai pelaksana PSN, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

f.7. Persetujuan Restrukturisasi Perbankan PT Wijaya Karya (Persero)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN Konstruksi yang melakukan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan IKN. Namun, sejak 2020 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan adanya pandemi covid-19 dan tingkat hutang yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah merumuskan 8 stream upaya penyehatan, yang

salah satu streamnya adalah Reprofilng/Restrukturisasi Keuangan dengan tujuan agar mendapatkan keringanan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rangka mengurangi tekanan kas jangka pendek – menengah. Untuk mendukung stream tersebut maka dibentuklah Tim Pecepatan Restrukturisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan mengajukan persetujuan restrukturisasi perbankan kepada 15 kreditur/bank dan perpanjangan pokok obligasi dan sukuk. 15 kreditur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tersebut telah menyetujui untuk melakukan restrukturisasi utang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan ditargetkan akan dilakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement pada bulan Januari 2024.

f.8. Kebijakan Dukungan Tambahan Penyertaan Modal Negara

Dalam rapat internal, Presiden RI juga menyampaikan arahan kepada PT BPUI untuk mengkalkulasi dana yang dibutuhkan IFG Life untuk menerima seluruh liabilitas yang belum dialihkan dengan tingkat RBC yang sesuai ketentuan. Atas hal tersebut, salah satu kebutuhan pendanaan yang dianggarkan oleh Direksi PT BPUI yaitu terkait Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023/“PMN TA 2023” dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun 2023 sebesar Rp3 triliun yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak PT Jiwasraya dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. PMN TA 2023 tersebut pun mendapatkan penetapan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Pemerintah. Kemudian, Direksi PT BPUI melalui suratnya mengajukan Permohonan Persetujuan Pemegang Saham (RUPS) atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp3 Triliun yang Bersumber dari Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023 yang disertai dengan surat tanggapan dari Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, melalui Surat Wakil Menteri BUMN Nomor S-646/MBU/Wk.R/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, Wakil Menteri BUMN selaku Kuasa Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT BPUI menyetujui penambahan penyertaan modal PT BPUI kepada PT Asuransi Jiwa IFG/“IFG Life” berupa uang sebesar Rp3 triliun yang bersumber dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT BPUI Tahun Anggaran 2023.

f.9. Relaksasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Entitas Holding Ultra Mikro

Keasdepan Jasa Keuangan memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Keuangan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp307.814.000 atau 100% dari Rp307.814.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 2 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa Surat Nomor S-218/MBU/Wk2/05/2023 Perihal Permohonan Relaksasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Entitas Holding Ultra Mikro dan Surat Nomor S-25/Wk.R.MBU/11/2023 Perihal Evaluasi dan Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMN TA 2022 Periode Triwulan III 2023 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemberian relaksasi BMPK terhadap PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani dalam rangka Holding Ultra Mikro agar memungkinkan ketersediaan ruang yang lebih besar dalam pembiayaan kepada masyarakat. Kementerian BUMN senantiasa mendorong kepada seluruh entitas Holding UMi untuk berkomitmen dalam mengedepankan mitigasi risiko pada setiap proses bisnis, diantaranya yaitu:

a) Perbaikan Underwriting Model

Penguatan proses underwriting pinjaman serta mengoptimalkan proses cross selling dan akuisisi nasabah di masing-masing entitas BRI, PT Pegadaian dan PT PNM dengan berdasarkan pada pemanfaatan database nasabah Ultra Mikro.

b) Peningkatan Kapabilitas Tenaga Pemasar

Penggunaan platform penjualan digital oleh tenaga pemasar ketiga entitas yang mampu memberikan informasi produk yang komprehensif, data referral yang reliable, pelacakan aplikasi serta tools sebagai pemantauan kinerja. Selain itu, seluruh tenaga pemasar PT Pegadaian dan PT PNM diberikan akses yang luas terhadap pendidikan best practice BRI melalui BRI Corporate University.

c) Optimalisasi Strategi Pendanaan

Sebagai alternatif pendanaan, PT Pegadaian dan PT PNM akan diarahkan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang sehingga dapat mengurangi kebutuhan pendanaan jangka pendek dari perbankan. Dengan menjadi bagian dari BRI Group, kedua entitas dapat menikmati akses pendanaan pasar modal yang lebih luas dengan perbaikan rating korporasi sehingga dapat diperoleh pendanaan dengan biaya yang lebih efisien.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperoleh PMN sebesar Rp2.479 Miliar sebagaimana ditetapkan pada PP Nomor 48 Tahun 2022 dalam rangka penguatan struktur permodalan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran jumlah Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Per tanggal 30 September 2023, BTN dapat memperbaiki

CAR menjadi 19,8% (di atas KPPM yang dipersyaratkan OJK) serta pencapaian realisasi KPI PMN per Triwulan III 2023 sudah mencapai 99,74%.

f.10. Penyelesaian Proyek Kawasan KEK Mandalika

Keasdepan Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp458.863.500 atau 100% dari Rp458.864.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang digunakan sebagai salah satu dasar proses pengajuan PMN untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviassi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.

f.11. Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media dengan menggunakan anggaran sebesar Rp39.368.000 atau 100% dari Rp39.368.000. Atas anggaran tersebut telah menghasilkan 1 Rekomendasi Kebijakan dengan bentuk Output berupa Surat Menteri BUMN kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: S-604/MBU/11/2023 perihal Penyampaian Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang merupakan rangkaian dalam Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang digunakan sebagai dasar pemberian penugasan SPBE kepada Perum Peruri pada tanggal 18 Desember 2023.

f.12. Pendanaan Untuk Kenaikan Biaya (*Cost Overrun*) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Logistik dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.033.364 atau 99% dari Rp190.273.000. Atas anggaran telah merealisasikan 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dari target 1 (satu) berupa Surat Menteri BUMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: S-552/MBU/11/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Penerimaan

f.12. Pendanaan Untuk Kenaikan Biaya (*Cost Overrun*) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

P

Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik memiliki rincian output Rumusan Kebijakan penugasan BUMN sektor Jasa Logistik dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.033.364 atau 99% dari Rp190.273.000. Atas anggaran telah merealisasikan 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dari target 1 (satu) berupa Surat Menteri BUMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: S-552/MBU/11/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Penerimaan Pinjaman dalam Pemenuhan Kenaikan Biaya (*Cost Overrun*) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Penerimaan fasilitas pinjaman dari China Development Bank dengan penjaminan oleh Pemerintah merupakan salah satu bentuk pendanaan selain melalui ekuitas dalam rangka pemenuhan biaya *cost overrun* Proyek KCJB. Atas hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pimpinan Konsorsium Indonesia dalam Proyek KCJB melakukan permohonan persetujuan penerimaan pinjaman kepada RUPS.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu untuk melakukan penguatan keuangan perusahaan dengan menambah sumber pendanaan yang berasal dari kegiatan di luar angkutan penumpang yang dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu melalui angkutan barang utamanya angkutan batu bara dengan melakukan penyesuaian tarif bagi seluruh pengguna/pelanggan jasa angkutan batu bara.


MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ERICK THOHIR

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
ESELON I : 01 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 606538 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/24 2:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6,500,000	0	6,500,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,500,000	0	43,500,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,250,565,000	3,265,939,278	0	3,265,939,278	261.16
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,250,565,000	3,315,939,278	0	3,315,939,278	265.16
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	4,000,000	0	4,000,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	17,575,162	0	17,575,162	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	17,575,162	0	17,575,162	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	171,661,348	0	171,661,348	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	209,029,835	0	209,029,835	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	380,691,183	0	380,691,183	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,250,565,000	3,718,205,623	0	3,718,205,623	297.32
	JUMLAH PENDAPATAN	1,250,565,000	3,718,205,623	0	3,718,205,623	297.32

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/24 2:56 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24,936,744,000	22,204,640,000	21,934,621,000	10,311,561	21,924,309,439	98.78	280,330,561
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	482,000	463,000	415,222	15,059	400,163	89.68	62,837
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,448,912,000	1,224,440,000	1,224,139,142	0	1,224,139,142	99.98	300,858
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	392,862,000	329,856,000	326,291,602	0	326,291,602	98.92	3,564,398
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,346,325,000	1,773,443,000	1,720,310,000	0	1,720,310,000	97	53,133,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	330,930,000	689,781,000	685,344,000	0	685,344,000	99.36	4,437,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	134,086,000	113,127,000	113,126,357	0	113,126,357	100	643
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,120,164,000	1,082,535,000	1,082,099,640	0	1,082,099,640	99.96	435,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,500,102,000	3,125,422,000	3,120,976,000	0	3,120,976,000	99.86	4,446,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,138,975,000	712,720,000	709,435,000	9,620,820	699,814,180	99.54	12,905,820
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	35,349,582,000	31,256,427,000	30,916,757,963	19,947,440	30,896,810,523	98.91	359,616,477
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	203,653,000	0	0	0	0		0
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	834,889,000	369,638,000	338,640,504	0	338,640,504	91.61	30,997,496
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat	840,000,000	700,000,000	630,000,000	0	630,000,000	90	70,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,878,542,000	1,069,638,000	968,640,504	0	968,640,504	90.56	100,997,496
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	190,082,000	173,552,400	0	173,552,400	91.3	16,529,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,000	1,538	0	1,538	76.9	462
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	13,224,000	11,570,160	0	11,570,160	87.49	1,653,840
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	5,290,000	4,628,064	0	4,628,064	87.49	661,936
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	244,000,000	222,000,000	0	222,000,000	90.98	22,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	9,994,000	9,124,920	0	9,124,920	91.3	869,080
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	462,592,000	420,877,082	0	420,877,082	90.98	41,714,918
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	43,189,816,000	39,463,684,000	38,782,072,555	0	38,782,072,555	98.27	681,611,445
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	1,295,625,000	1,224,887,134	0	1,224,887,134	94.54	70,737,866
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	43,189,816,000	40,759,309,000	40,006,959,689	0	40,006,959,689	98.15	752,349,311
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	80,417,940,000	73,747,966,000	72,313,235,238	19,947,440	72,293,287,798	98.05	1,454,678,202

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/24 2:56 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,235,025,000	12,777,694,000	12,762,062,521	8,378,393	12,753,684,128	99.88	24,009,872
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,833,000	7,207,000	7,089,310	0	7,089,310	98.37	117,690
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,618,563,000	1,329,563,000	981,991,819	0	981,991,819	73.86	347,571,181
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,337,566,000	7,795,323,000	7,733,769,628	0	7,733,769,628	99.21	61,553,372
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	251,200,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	23,462,187,000	21,909,787,000	21,484,913,278	8,378,393	21,476,534,885	98.06	433,252,115
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,344,553,000	7,652,165,000	7,380,677,202	228,183	7,380,449,019	96.45	271,715,981
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,164,330,000	1,921,811,000	1,904,584,697	1,663,636	1,902,921,061	99.1	18,889,939
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,743,715,000	6,021,203,000	6,007,892,605	0	6,007,892,605	99.78	13,310,395
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,252,598,000	15,595,179,000	15,293,154,504	1,891,819	15,291,262,685	98.06	303,916,315
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,526,000,000	2,398,011,000	2,388,391,184	0	2,388,391,184	99.6	9,619,816
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,526,000,000	2,398,011,000	2,388,391,184	0	2,388,391,184	99.6	9,619,816
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,265,000,000	6,669,000,000	6,630,932,856	0	6,630,932,856	99.43	38,067,144
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	24,000,000	5,416,734	0	5,416,734	22.57	18,583,266
522113	Belanja Langganan Air	336,000,000	420,700,000	402,296,351	0	402,296,351	95.63	18,403,649
522131	Belanja Jasa Konsultan	8,227,800,000	7,586,090,000	7,586,088,858	0	7,586,088,858	100	1,142
522141	Belanja Sewa	13,475,016,000	11,660,701,000	11,643,296,000	0	11,643,296,000	99.85	17,405,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,100,941,000	2,202,705,000	2,034,869,999	8,757,500	2,026,112,499	92.38	176,592,501
522191	Belanja Jasa Lainnya	44,228,528,000	35,543,892,000	35,247,779,858	59,149,808	35,188,630,050	99.17	355,261,950
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	226,572,000	480,000	480,000	0	480,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	75,931,857,000	64,107,568,000	63,551,160,656	67,907,308	63,483,253,348	99.13	624,314,652
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	262,916,000	957,199,000	890,610,337	0	890,610,337	93.04	66,588,663
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	711,100,000	711,084,000	711,083,293	0	711,083,293	100	707
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,922,032,000	7,147,158,000	7,143,641,610	0	7,143,641,610	99.95	3,516,390
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	30,060,000	29,173,000	0	29,173,000	97.05	887,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,060,476,000	2,580,823,000	2,580,810,600	0	2,580,810,600	100	12,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	9,981,524,000	11,426,324,000	11,355,318,840	0	11,355,318,840	99.38	71,005,160
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/24 2:56 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,772,874,000	12,468,017,000	12,347,696,703	14,708,542	12,332,988,161	99.03	135,028,839
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,220,592,000	887,741,000	861,556,000	580,000	860,976,000	97.05	26,765,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,628,938,000	4,697,159,000	4,630,134,596	0	4,630,134,596	98.57	67,024,404
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,567,315,000	9,957,365,000	9,831,018,349	2,309,000	9,828,709,349	98.73	128,655,651
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	28,189,719,000	28,010,282,000	27,670,405,648	17,597,542	27,652,808,106	98.79	357,473,894
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	969,128,000	1,237,027,000	1,230,860,793	11,381,400	1,219,479,393	99.5	17,547,607
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	63,541,000	36,692,000	36,691,494	0	36,691,494	100	506
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,032,669,000	1,273,719,000	1,267,552,287	11,381,400	1,256,170,887	99.52	17,548,113
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	156,376,554,000	144,720,870,000	143,010,896,397	107,156,462	142,903,739,935	98.82	1,817,130,065
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,810,000,000	13,422,461,000	13,387,724,246	0	13,387,724,246	99.74	34,736,754
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,810,000,000	13,422,461,000	13,387,724,246	0	13,387,724,246	99.74	34,736,754
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	550,000,000	416,714,000	345,371,000	0	345,371,000	82.88	71,343,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	17,250,000,000	9,217,157,000	9,144,057,666	0	9,144,057,666	99.21	73,099,334
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	17,800,000,000	9,633,871,000	9,489,428,666	0	9,489,428,666	98.5	144,442,334
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	23,610,000,000	23,056,332,000	22,877,152,912	0	22,877,152,912	99.22	179,179,088
	JUMLAH BELANJA	260,404,494,000	241,525,168,000	238,201,284,547	127,103,902	238,074,180,645	98.62	3,450,987,355

NERACA PERCOBAAN AKRUAL SALDO AWAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : 01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 606538	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 08/05/2024 2:58 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	3,629,370,644	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	136,355,033	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	41,678,902	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	79,044,428
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,226,495
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,379,612,363	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	58,018,560	0
0.0	117114	Suku Cadang	10,979,673	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	15,475,255	0
0.0	131111	Tanah	1,468,058,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	136,884,866,357	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	469,161,643,003	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	96,518,467,983
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	44,793,609,388
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,757,946,764
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	28,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	141,204
0.0	162151	Software	13,339,482,643	0
0.0	162161	Lisensi	2,850,515,278	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3,199,528,242	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	13,296,848,764
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,838,696,532
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	3,174,965,242
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	357,032,907
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	21,375,586

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 606538

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 08/05/2024 2:58 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	5,198,958,526
0.0	391111	Ekuitas	0	1,940,531,687,224
JUMLAH			2,107,571,018,543	2,107,571,018,543

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	5,356,051,289	0
0.0	114115	Beban Modal Dibayar di Muka (prepaid)	2,626,600,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	164,471,926	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,137,478	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	81,203,113
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,687
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,665,916,155	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	108,461,700	0
0.0	117114	Suku Cadang	24,297,103	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	29,321,305	0
0.0	131111	Tanah	1,468,058,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	150,009,750,037	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	502,779,300,372	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,040,842,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	115,794,005,309
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	50,638,577,879
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,013,027,548
0.0	138311	Properti Investasi	21,349,361,185	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	3,466,702,900
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	121,204
0.0	162151	Software	13,313,434,032	0
0.0	162161	Lisensi	2,815,169,280	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	11,344,665,203	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,500,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,500,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	13,313,434,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,111,376,960
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	37,764,690
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,972,707,349
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	3,934,330,990
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	238,074,180,645
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,718,205,623	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,248,800
0.0	391111	Ekuitas	0	1,940,531,687,224
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	4,486,123,363
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	52,450,256,467
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6,500,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,500,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,584,931,191
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	17,575,162
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	169,105,448
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	192,985,289
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	17,760,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	21,888,010,945	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	400,163	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,224,139,142	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	326,291,602	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,437,927,150	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	685,344,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	113,126,357	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,082,099,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,120,976,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	699,814,180	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	338,640,504	0
3.0	511337	Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	630,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	173,552,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,538	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,570,160	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,628,064	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	222,000,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9,124,920	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	38,771,674,144	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,224,887,134	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	10,874,528,483	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,089,310	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	981,991,819	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,733,769,628	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,380,449,019	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,902,921,061	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,259,392,605	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33,839,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,610,213,881	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,416,734	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	401,639,740	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	7,585,468,923	0
3.0	522141	Beban Sewa	11,643,296,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,026,112,499	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	38,101,067,131	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	480,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	890,610,337	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	711,083,293	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,044,616,610	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,173,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,580,810,600	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12,332,988,161	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	860,976,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,630,134,596	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,828,709,349	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,219,479,393	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	36,691,494	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17,491,066,696	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,815,554,754	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	255,080,784	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	42,633,879	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	283,284,228	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,767,300	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,819,118,257	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	60,490,260	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	33,122,556	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	70,198,689	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	271,823	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	43,946
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	20,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	31,720,409	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	61,988,064	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	41,551,010	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			2,440,952,982,696	2,440,952,982,696

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	238,074,180,645
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,718,205,623	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6,500,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,500,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,265,939,278
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	4,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	17,575,162
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	171,661,348
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	209,029,835
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,934,621,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	415,222	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,224,139,142	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	326,291,602	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,720,310,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	685,344,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	113,126,357	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,082,099,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,120,976,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	709,435,000	0
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	338,640,504	0
3.0	511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	630,000,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	173,552,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,538	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,570,160	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,628,064	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	222,000,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,124,920	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	38,782,072,555	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,224,887,134	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,762,062,521	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,089,310	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	981,991,819	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,733,769,628	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,380,677,202	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,904,584,697	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,007,892,605	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,388,391,184	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	6,630,932,856	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,416,734	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	402,296,351	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	7,586,088,858	0
3.0	522141	Belanja Sewa	11,643,296,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,034,869,999	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	35,247,779,858	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	480,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	890,610,337	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	711,083,293	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,143,641,610	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,173,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,580,810,600	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,347,696,703	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	861,556,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,630,134,596	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,831,018,349	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,230,860,793	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	36,691,494	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,387,724,246	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	345,371,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9,144,057,666	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	10,311,561
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	15,059
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	9,620,820
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	8,378,393
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	228,183
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,663,636
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	8,757,500
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	59,149,808
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	14,708,542
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	580,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,309,000
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	11,381,400
JUMLAH			241,919,490,170	241,919,490,170

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl.Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl.Cetak : 08/05/24 3:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,664,518,691
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	108,671,580
117114	Suku Cadang	26,121,367
117199	Persediaan Lainnya	28,684,625
131111	Tanah	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin	150,009,750,037
133111	Gedung dan Bangunan	502,779,300,372
134113	Jaringan	7,706,388,680
135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,040,842,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(115,794,005,309)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(50,638,577,879)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,013,027,548)
138311	Properti Investasi	21,349,361,185
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3,466,702,900)
162151	Software	13,313,434,032
162161	Lisensi	2,815,169,280
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,500,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,500,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(13,313,434,032)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,111,376,960)
J U M L A H		1,982,630,480,383

LAPORAN PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tanggal : 08/05/24 3:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	66,648,142
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	15,540
1010301003	Penjepit Kertas	17,889,664
1010301004	Penghapus/Korektor	2,302,022
1010301005	Buku Tulis	6,842,580
1010301006	Ordner Dan Map	149,992,975
1010301007	Penggaris	350,648
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	4,347,493
1010301009	Pita Mesin Ketik	610,500
1010301010	Alat Perekat	8,713,337
1010301014	Barang Cetak	45,500,975
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	92,978,791
1010302001	Kertas HVS	169,389,430
1010302002	Berbagai Kertas	16,568,473
1010302003	Kertas Cover	207,196
1010302004	Amplop	24,023,236
1010302005	Kop Surat	108,603,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	7,457,250
1010304004	Tinta/Toner Printer	920,547,790
1010304006	USB/Flash Disk	6,483,510
1010306010	Batu Baterai	10,392,672
1010701002	Minuman	4,653,467
Jumlah Barang Konsumsi		1,664,518,691
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	108,671,580
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		108,671,580
117114	Suku Cadang	
1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	26,121,367
Jumlah Suku Cadang		26,121,367
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	7,899,946
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	17,720,245
1010401004	Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)	277,222
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	2,787,212
Jumlah Persediaan Lainnya		28,684,625
TOTAL		1,827,996,263

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 80,109,070 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	18,122	1,468,058,953,000
20101	TANAH PERSIL	-	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	18,122	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin		6,594	136,884,866,357	1,060	13,326,316,119	68	201,432,439	7,586	150,009,750,037
30103	ALAT BANTU	-	14	17,840,098,171	1	2,345,000,000	0	0	15	20,185,098,171
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	27	7,866,284,600	0	0	0	0	27	7,866,284,600
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	23	46,899,100	5	9,908,000	0	0	28	56,807,100
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	86	2,903,713,437	0	0	0	0	86	2,903,713,437
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	6,390,600	3	6,660,000	3	6,660,000	4	6,390,600
30303	ALAT UKUR	-	1	1,658,800	0	0	0	0	1	1,658,800
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	11,644,050	0	0	0	0	6	11,644,050
30501	ALAT KANTOR	-	1,403	10,341,780,016	133	692,711,796	6	28,236,200	1,530	11,006,255,612
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3,783	37,139,516,025	579	2,844,079,788	54	151,925,489	4,308	39,831,670,324
30601	ALAT STUDIO	-	185	5,043,593,570	5	164,403,600	0	0	190	5,207,997,170
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	53	298,191,190	3	27,205,000	0	0	56	325,396,190
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	114,524,679	0	0	0	0	1	114,524,679
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	19	171,193,000	9	42,668,630	0	0	28	213,861,630
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	6,500,802	0	0	0	0	2	6,500,802
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	40	6,044,032,722	1	17,760,000	5	14,610,750	36	6,047,181,972
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	0	0	1	4,884,000	0	0	1	4,884,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4	25,951,200	0	0	0	0	4	25,951,200
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	2	26,313,980	0	0	0	0	2	26,313,980
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	29,920,000	0	0	0	0	1	29,920,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	585	11,389,825,635	259	5,770,520,000	0	0	844	17,160,345,635
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	343	37,165,576,351	26	1,323,470,205	0	0	369	38,489,046,556
31503	ALAT SAR	-	2	199,796,453	0	0	0	0	2	199,796,453
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0	0	1	1,332,000	0	0	1	1,332,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	1	75,042,000	0	0	0	0	1	75,042,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	9	136,419,976	34	75,713,100	0	0	43	212,133,076
133111	Gedung dan Bangunan		4	469,161,643,003	2	104,338,531,094	3	70,720,873,725	3	502,779,300,372
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	469,161,643,003	2	104,338,531,094	3	70,720,873,725	3	502,779,300,372
134113	Jaringan		3	7,706,388,680	0	0	0	0	3	7,706,388,680
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	7,077,847,260	0	0	0	0	1	7,077,847,260
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	451,399,180	0	0	0	0	1	451,399,180
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	177,142,240	0	0	0	0	1	177,142,240
135121	Aset Tetap Lainnya		3,047	1,066,410,162	0	0	0	0	3,047	1,066,410,162
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,026	576,910,162	0	0	0	0	3,026	576,910,162

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:01 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	21	489,500,000	0	0	0	0	21	489,500,000
138311	Properti Investasi		0	0	1	21,349,361,185	0	0	1	21,349,361,185
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	0	0	1	21,349,361,185	0	0	1	21,349,361,185
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	64	178,226,715	63	174,726,715	1	3,500,000
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	6	10,476,200	6	10,476,200	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	53	153,139,765	52	149,639,765	1	3,500,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	5	14,610,750	5	14,610,750	0	0
TOTAL				2,082,878,261,202		139,192,435,113		71,097,032,879		2,150,973,663,436

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA EKSTRAKOMTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		225	137,342,204	89	66,383,409	18	9,872,125	296	193,853,488
30501	ALAT KANTOR	-	20	11,655,000	0	0	0	0	20	11,655,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	184	109,770,204	87	64,607,409	14	6,132,125	257	168,245,488
30601	ALAT STUDIO	-	7	6,160,000	0	0	0	0	7	6,160,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	8	4,367,000	0	0	0	0	8	4,367,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	6	5,390,000	2	1,776,000	4	3,740,000	4	3,426,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	18	9,872,125	18	9,872,125	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	14	6,132,125	14	6,132,125	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	4	3,740,000	4	3,740,000	0	0
TOTAL				137,342,204		76,255,534		19,744,250		193,853,488

ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tanggal : 08/05/24 3:09 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		1,873	13,339,482,643	0	0	1	26,048,611	1,872	13,313,434,032
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1,873	13,339,482,643	0	0	1	26,048,611	1,872	13,313,434,032
162161	Lisensi		2	2,850,515,278	0	0	1	35,345,998	1	2,815,169,280
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	2	2,850,515,278	0	0	1	35,345,998	1	2,815,169,280
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		6	3,199,528,242	2	61,394,609	8	3,260,922,851	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	6	3,199,528,242	2	61,394,609	8	3,260,922,851	0	0
TOTAL				19,389,526,163		61,394,609		3,322,317,460		16,128,603,312

LAPORAN PENYUSUTAN INTRAKOMTABEL

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	1,468,058,953,000
20101	TANAH PERSIL	-	18,122	1,468,058,953,000	0	0	0	0	1,468,058,953,000
132111	Peralatan dan Mesin		7,586	150,009,750,037	(96,518,467,983)	(19,275,537,326)	0	(115,794,005,309)	34,215,744,728
30103	ALAT BANTU	-	15	20,185,098,171	(9,707,580,107)	(1,993,671,726)	0	(11,701,251,833)	8,483,846,338
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	27	7,866,284,600	(6,715,641,742)	(226,242,857)	0	(6,941,884,599)	924,400,001
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	28	56,807,100	(37,100,975)	(12,275,125)	0	(49,376,100)	7,431,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	86	2,903,713,437	(1,639,293,702)	(289,195,334)	0	(1,928,489,036)	975,224,401
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	6,390,600	(6,390,600)	0	0	(6,390,600)	0
30303	ALAT UKUR	-	1	1,658,800	(1,658,800)	0	0	(1,658,800)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	11,644,050	(11,644,050)	0	0	(11,644,050)	0
30501	ALAT KANTOR	-	1,530	11,006,255,612	(6,571,602,996)	(1,627,827,103)	0	(8,199,430,099)	2,806,825,513
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	4,308	39,831,670,324	(26,019,013,665)	(5,588,690,483)	0	(31,607,704,148)	8,223,966,176
30601	ALAT STUDIO	-	190	5,207,997,170	(3,313,370,749)	(589,514,762)	0	(3,902,885,511)	1,305,111,659
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	56	325,396,190	(191,956,199)	(44,440,454)	0	(236,396,653)	88,999,537
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	114,524,679	(51,536,106)	(11,452,468)	0	(62,988,574)	51,536,105
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	28	213,861,630	(84,109,080)	(53,816,326)	0	(137,925,406)	75,936,224
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	6,500,802	(2,600,320)	(1,300,160)	0	(3,900,480)	2,600,322
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	36	6,047,181,972	(5,699,620,648)	(91,476,555)	0	(5,791,097,203)	256,084,769
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1	4,884,000	0	(348,857)	0	(348,857)	4,535,143
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4	25,951,200	(2,372,407)	(1,730,080)	0	(4,102,487)	21,848,713
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	2	26,313,980	(14,731,574)	(2,573,868)	0	(17,305,442)	9,008,538
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	29,920,000	(29,920,000)	0	0	(29,920,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	844	17,160,345,635	(7,946,144,779)	(3,357,073,924)	0	(11,303,218,703)	5,857,126,932
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	369	38,489,046,556	(28,149,275,522)	(5,315,011,533)	0	(33,464,287,055)	5,024,759,501
31503	ALAT SAR	-	2	199,796,453	(199,796,453)	0	0	(199,796,453)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	1,332,000	0	(83,250)	0	(83,250)	1,248,750
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	1	75,042,000	(32,160,858)	(10,720,286)	0	(42,881,144)	32,160,856
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	43	212,133,076	(90,946,651)	(58,092,175)	0	(149,038,826)	63,094,250
133111	Gedung dan Bangunan		3	502,779,300,372	(44,793,609,388)	(5,844,968,491)	0	(50,638,577,879)	452,140,722,493
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	502,779,300,372	(44,793,609,388)	(5,844,968,491)	0	(50,638,577,879)	452,140,722,493
134113	Jaringan		3	7,706,388,680	(1,757,946,764)	(255,080,784)	0	(2,013,027,548)	5,693,361,132
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	7,077,847,260	(1,414,009,955)	(231,177,032)	0	(1,645,186,987)	5,432,660,273
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	451,399,180	(233,222,909)	(15,046,640)	0	(248,269,549)	203,129,631
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	177,142,240	(110,713,900)	(8,857,112)	0	(119,571,012)	57,571,228
135121	Aset Tetap Lainnya		3,047	1,066,410,162	0	0	0	0	1,066,410,162
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,026	576,910,162	0	0	0	0	576,910,162
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	21	489,500,000	0	0	0	0	489,500,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:11 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
138311	Properti Investasi		1	21,349,361,185	0	(3,466,702,900)	0	(3,466,702,900)	17,882,658,285
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	21,349,361,185	0	(3,466,702,900)	0	(3,466,702,900)	17,882,658,285
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	3,500,000	0	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	3,500,000	0	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
JUMLAH			28,763	2,150,973,663,436	(143,070,024,135)	(28,845,789,501)	0	(171,915,813,636)	1,979,057,849,800

LAPORAN PENYUSUTAN EKSTRAKOMTABEL

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		296	193,853,488	(63,111,118)	(24,390,338)	0	(87,501,456)	106,352,032
30501	ALAT KANTOR	-	20	11,655,000	(1,165,500)	(2,331,000)	0	(3,496,500)	8,158,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	257	168,245,488	(54,997,740)	(20,805,440)	0	(75,803,180)	92,442,308
30601	ALAT STUDIO	-	7	6,160,000	(3,080,000)	(1,232,000)	0	(4,312,000)	1,848,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	8	4,367,000	(2,183,500)	(873,400)	0	(3,056,900)	1,310,100
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	4	3,426,000	(1,684,378)	851,502	0	(832,876)	2,593,124
JUMLAH			296	193,853,488	(63,111,118)	(24,390,338)	0	(87,501,456)	106,352,032

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tanggal : 08/05/24 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		1,872	13,313,434,032	(13,296,848,764)	(16,585,268)	0	(13,313,434,032)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1,872	13,313,434,032	(13,296,848,764)	(16,585,268)	0	(13,313,434,032)	0
162161	Lisensi		1	2,815,169,280	(1,838,696,532)	(272,680,428)	0	(2,111,376,960)	703,792,320
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	2,815,169,280	(1,838,696,532)	(272,680,428)	0	(2,111,376,960)	703,792,320
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	(3,174,965,242)	3,174,965,242	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	(3,174,965,242)	3,174,965,242	0	0	0
JUMLAH			1,873	16,128,603,312	(18,310,510,538)	2,885,699,546	0	(15,424,810,992)	703,792,320

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: BAR-2/KPB.MBU/5/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-05-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arief Maulana
NIP : 199002232015031002
Jabatan : Subkoordinator

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Sukamdani Eko Basuki
NIP : 198404102006021001
Jabatan : Subkoordinator Verifikasi dan Akuntansi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara BMN pada lingkup Kementerian BUMN dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan BMN yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun 2023 (Audited) dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2023 (Audited)		
		Nilai MAT	Nilai GLP	Selisih
I	POSISI BMN DI NERACA	1.982.630.480.383	1.982.630.480.383	0
A	ASET LANCAR	1.827.996.263	1.827.996.263	0
1	Persediaan 1)	1.827.996.263	1.827.996.263	0
B	ASET TETAP	1.962.216.033.515	1.962.216.033.515	0
1	Tanah	1.468.058.953.000	1.468.058.953.000	0
2	Peralatan dan Mesin	150.009.750.037	150.009.750.037	0
3	Gedung dan Bangunan	502.779.300.372	502.779.300.372	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	7.706.388.680	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	1.066.410.162	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.040.842.000	1.040.842.000	0
7	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	0	0
8	Akum. Penyusutan Aset Tetap	-168.445.610.736	-168.445.610.736	0
C	PROPERTI INVESTASI	17.882.658.285	17.882.658.285	0
1	Properti Investasi	21.349.361.185	21.349.361.185	0
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-3.466.702.900	-3.466.702.900	0
C	ASET LAINNYA	703.792.320	703.792.320	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	16.128.603.312	16.128.603.312	0
3	Aset Lain-lain 2)	3.500.000	3.500.000	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	-15.428.310.992	-15.428.310.992	0
II	BMN NON NERACA	167.746.641	0	167.746.641
A	EKSTRAKOMPTABEL*	106.352.032	0	106.352.032

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2023 (Audited)		
		Nilai MAT	Nilai GLP	Selisih
1	BMN Ekstrakomptabel*	193.853.488	0	193.853.488
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel*	-87.501.456	0	-87.501.456
B	BPYBDS*	0	0	0
C	BARANG HILANG*	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT*	61.394.609	0	61.394.609
E	BARANG PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN*	0	0	0
TOTAL (I + II)		1.982.798.227.024	1.982.798.227.024	167.746.641

*) Tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited), dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Subkoordinator



Arief Maulana
NIP 199002232015031002

Subkoordinator Verifikasi
dan Akuntansi



Sukamdani Eko Basuki
NIP 198404102006021001

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA 041) TAHUN 2023
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023 (AUDITED)**

Nomor: NKF- 36 /041/PB.6/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 03 Mei 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian BUMN (BA 041) Tahun 2023**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian BUMN (BA 041) Tahun 2023** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2023 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Kementerian BUMN (BA 041)** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) **paling lambat tanggal 8 Mei 2024.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian BUMN
Kepala Bagian Tata Usaha
dan Keuangan

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP


Sutrisno

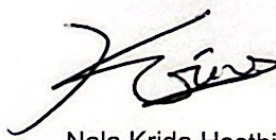


Idris Aswin



Mohamad Hadad

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK

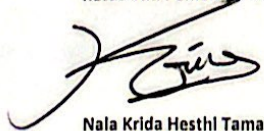

Nala Krida Hesthi Tama

DAFTAR USULAN KOREKSI LK UNAUDITED TA 2023

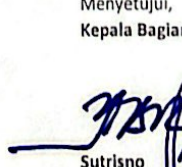
Kode 606538
Instansi KEMENTERIAN BUMN (BA 041)

No	Koreksi	Kode Akun	Nilai Debit (Rp)	Nilai Kredit (Rp)
1	<i>Reklas salah catat kode akun saat pendetilan aset Belanja Modal Gedung-Renovasi Gedung Press Confrence dan Daycare</i>			
	Peralatan dan Mesin	132111	224.547.800	
	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	521252	33.839.000	
	Gedung dan Bangunan	133111		258.386.800
	<i>Jurnal reklasifikasi Aset Tetap</i>			
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	2.583.868	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211		2.583.868
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas salah catat belanja modal intrakomptabel peralatan dan mesin dan ekstrakomptable</i>			
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	22.454.780	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	137111		22.454.780
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas salah catat belanja modal intrakomptabel</i>			
2	<i>Reklas salah catat kode akun saat pendetilan aset Hibah Lanscape</i>			
	Peralatan dan Mesin	132111	432.552.710	
	Gedung dan Bangunan	133111		432.552.710
	<i>Jurnal reklasifikasi Aset Tetap</i>			
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	4.325.527	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211		4.325.527
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas salah catat belanja modal intrakomptabel</i>			
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	44.765.405	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	137111		44.765.405
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas salah catat belanja modal intrakomptabel</i>			
3	<i>Reklas salah catat kode akun saat pendetilan aset Hibah Masjid</i>			
	Peralatan dan Mesin	132111	24.636.316	
	Gedung dan Bangunan	133111		24.636.316
	<i>Jurnal reklasifikasi Aset Tetap</i>			
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	273.737	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211		273.737
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas salah catat belanja modal intrakomptabel peralatan dan mesin</i>			
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	2.463.632	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	137111		2.463.632
	<i>Jurnal koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas salah catat belanja modal intrakomptabel gedung dan bangunan</i>			
4	<i>Koreksi kelebihan catat KDP sesuai kemajuan pekerjaan per 31 Des 2023</i>			
	Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	114115	2.626.600.000	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	136111		2.626.600.000

Mengetahui,
Ketua Tim Pemeriksa BPK


Nala Krida Hesthi Tama

Jakarta, 3 Mei 2024
Menyetujui,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan


Sutrisno



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-34041/PB.6/2024
Tanggal : 3 Mei 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Kementerian BUMN
BA : 041

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.718.205.623	-	-	3.718.205.623
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNPB Lainnya	3.718.205.623			3.718.205.623
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	3.718.205.623	-	-	3.718.205.623
Belanja Pegawai	72.293.287.798		-	72.293.287.798
Belanja Barang dan Jasa	142.903.739.935		-	142.903.739.935
Belanja Modal	22.877.152.912			22.877.152.912
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	238.074.180.645	-	-	238.074.180.645
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			-
Insentif Fiskal	-			-
TOTAL TKD	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
TOTAL PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Jakarta, 03 Mei 2024
Kementerian BUMN



Kementerian Keuangan

Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan

Nala Krida Hesthi Tama

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Kementerian BUMN
 BA : 041

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	-			-
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	5.356.051.289	2.626.600.000		7.982.651.289
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Perpajakan	-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	223.609.404			223.609.404
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(81.498.800)			(81.498.800)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	142.110.604	-	-	142.110.604
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	3.500.000			3.500.000
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	(17.500)			(17.500)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	3.482.500	-	-	3.482.500
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	1.827.996.263			1.827.996.263
Persediaan yang Belum Diregister	-			-
Jumlah Aset Lancar	7.329.640.656	2.626.600.000	-	9.956.240.656
ASET TETAP				
Tanah	1.468.058.953.000			1.468.058.953.000
Peralatan dan Mesin	149.328.013.211	681.736.826		150.009.750.037
Gedung dan Bangunan	503.494.876.198		715.575.826	502.779.300.372
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.706.388.680			7.706.388.680
Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162			1.066.410.162
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.667.442.000		2.626.600.000	1.040.842.000
Aset Konsesi Jasa	-			-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(115.724.321.492)		69.683.817	(115.794.005.309)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(50.645.761.011)	7.183.132		(50.638.577.879)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.013.027.548)			(2.013.027.548)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Aset Tetap	1.964.938.973.200	688.919.958	3.411.859.643	1.962.216.033.515
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	21.349.361.185			21.349.361.185

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.466.702.900)			(3.466.702.900)
Jumlah Properti Investasi	17.882.658.285	-	-	17.882.658.285
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	24.240.748			24.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(121.204)			(121.204)
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	24.119.544	-	-	24.119.544
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	24.119.544	-	-	24.119.544
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	16.128.603.312			16.128.603.312
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-			-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	11.344.665.203			11.344.665.203
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	3.500.000			3.500.000
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ketiga	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(3.500.000)			(3.500.000)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(15.424.810.992)			(15.424.810.992)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-			-
Jumlah Aset Lainnya	12.048.457.523	-	-	12.048.457.523
JUMLAH ASET	2.002.223.849.208	3.315.519.958	3.411.859.643	2.002.127.509.523
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9.010.472.039			9.010.472.039
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.934.330.990			3.934.330.990
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KPPN	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.944.803.029	-	-	12.944.803.029
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Kewajiban Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN	12.944.803.029	-	-	12.944.803.029
EKUITAS	1.989.279.046.179	103.522.817	7.183.132	1.989.182.706.494
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.002.223.849.208	103.522.817	7.183.132	2.002.127.509.523

Jakarta, 03 Mei 2024
Kementerian BUMN

Sutrisno

Ditjen Kekayaan Negara

Idris Aswin

Kementerian Keuangan

Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan

Nala Krida Hesthi Tama

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Kementerian BUMN
 BA : 041

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.609.006.353			4.609.006.353
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.609.006.353	-	-	4.609.006.353
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	4.609.006.353	-	-	4.609.006.353
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	71.964.208.043			71.964.208.043
Beban Persediaan	1.889.316.946			1.889.316.946
Beban Barang dan Jasa	101.545.557.242	33.839.000		101.579.396.242
Beban Pemeliharaan	11.349.906.656			11.349.906.656
Beban Perjalanan Dinas	28.908.978.993			28.908.978.993
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-			-
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.826.886.956	69.683.817	7.183.132	31.889.387.641
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	207.877			207.877
Beban Lain-lain	-			-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	247.485.062.713	103.522.817	7.183.132	247.581.402.398
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 242.876.056.360	- 103.522.817	- 7.183.132	- 242.972.396.045
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43.500.000			43.500.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	61.988.064			61.988.064
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	- 18.488.064	-	-	- 18.488.064
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	379.850.737			379.850.737
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41.551.010			41.551.010
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	338.299.727	-	-	338.299.727
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	319.811.663	-	-	319.811.663

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-			-
Beban Luar Biasa	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	- 242.556.244.697	- 103.522.817	- 7.183.132	- 242.652.584.382

Jakarta, 03 Mei 2024
Kementerian BUMN


Sutrisno



Ditjen Kekayaan Negara

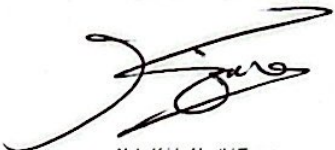

Idris Aswadi



Kementerian Keuangan


Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan


Nala Krida Hesthi Tama

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Kementerian BUMN
 BA : 041

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	1.940.531.687.224			1.940.531.687.224
SURPLUS/DEFISIT LO	(242.556.244.697)	(103.522.817)	(7.183.132)	(242.652.584.382)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Penyesuaian SILPA	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	4.486.123.363			4.486.123.363
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	-			-
Koreksi atas Transaksi BMN Lainnya	-			-
Koreksi Lain-lain	-			-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	4.486.123.363	-	-	4.486.123.363
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	-			-
Ditagihkan ke Entitas Lain	238.074.180.645			238.074.180.645
Diterima Dari Entitas Lain	(3.718.205.623)			(3.718.205.623)
Transfer Keluar	-			-
Transfer Masuk	11.248.800			11.248.800
Pengesahan Hibah Langsung	52.450.256.467			52.450.256.467
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	286.817.480.289			286.817.480.289
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	48.747.358.955	103.522.817	7.183.132	48.651.019.270
EKUITAS AKHIR	1.989.279.046.179	103.522.817	7.183.132	1.989.182.706.494

Jakarta, 03 Mei 2024
 Kementerian BUMN


 Sutrisno



Kementerian Keuangan


 Mohamad Hadad

Ditjen Kekayaan Negara


 Idris Aswin



Badan Pemeriksa Keuangan


 Nala Krida Hesthi Tama

INFORMASI REKENING KEMENTERIAN



DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	BA-Es.I	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang (Rp)
1	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Induk (Giro)	202.001.000.262.307	RKK KEMENTERIAN BUMN.OPS	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0
2	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Induk (Giro)	650.796.065.381.000	BPG 019 KEMENT.BUMN	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0